

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN DISABILITAS  
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Fakultas Dakwah  
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:

**ZUHROTUL KHOLIDAH ISNAINI**

**NIM: D20162006**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS DAKWAH  
JULI 2021**

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN DISABILITAS DI  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Fakultas Dakwah  
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh:

**ZUHROTUL KHOLIDAH ISNAINI**

**NIM: D20162006**

**Disetujui Pembimbing**



**Drs. H. Rosyadi Br. M.Pd.I**  
**NIP. 19601206 199303 1 001**

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN DISABILITAS DI  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1)  
Fakultas Dakwah  
Program Studi Pengembangan Masyarakat

**Hari : Kamis  
Tanggal : 29 Juli 2021**

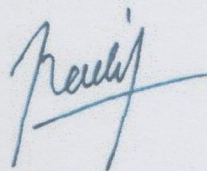
**Tim Penguji**

**Ketua**



**Siti Raudhatul Jannah, S.Ag, M.Med.Kom**  
NIP. 19720715 200604 2 001

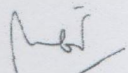
**Sekretaris**



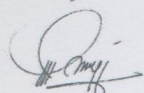
**Drs. Abdul Choliq, M.I.Kom**  
NUP. 201603110

Anggota:

1. Muhbbin, S.Ag, M.Si

(  )

2. Dr. H. Rosyadi Br, M.Pd.I

(  )

menyetujui  
Dekan Fakultas Dakwah



**Prof. Dr. Abidul Asror., M.Ag**  
NIP. 19740606 200003 1 003



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya Skripsi ini dengan baik dan lancar. Teriringi doa serta terima kasih saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tua, Ibuk dan Abah yang sudah memberikan segala suport untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah. semoga allah limpahkan selalu kesehatan unuk beliau.
2. Mas M. Idrus Husni dan Adikku Filzah Zulfah Hasnaá terimakasih atas dukungan dan suport
3. Drs. H. Rosyadi Br, M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan semangat semoga kesabarannya dalam mendidik dan mengarahkan penulis bernilai ibadah. Aamiin ya rabb.
4. Segenap teman-teman Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam angkatan 2016, teman-teman PP. Nurul Hidayah. Teman seperjuangan selama kuliah di IAIN Jember.
5. Sahabatku Comdev flower yang selalu ada saat suka dan duka selama di kuliah dan sampai saat ini.
6. Kepada suamiku yang telah membantu dari awal pengajuan judul hingga penyelesaian skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga sampai saat ini masih bisa merasakan kenikmatannya Iman dan Islam, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Disabilitas Di Kabupaten Probolinggo.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis. Sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya Kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor Institut Islam Negeri (IAIN) Jember
2. Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah IAIN Jember sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. H. Zainul Fanani, M.Ag selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI).

4. Bapak Samsul Hadi selaku Kepala seksi Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, serta Bapak Achmad Arif selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo yang telah bersedia dan meluangkan waktunya memberikan kesempatan untuk membantu penulis dalam penelitian.
5. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah IAIN Jember yang telah memberikan Ilmunya kepada kami.

Akhir kata, semoga segala kebaikan yang telah Bapak/ Ibu dan teman-teman berikan mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dari Allah SWT, Aamiin.

Jember, 08 Agustus 2021  
Penulis,

**Zuhrotul Kholidah Isnaini**  
**NIM. D20162006**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## ABSTRAK

**Zuhrotul K.I, 2021:** *Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Disabilitas Di Kabupaten Probolinggo.*

**Kata Kunci:** Peran dan pemberdayaan disabilitas Kabupaten Probolinggo

Dinas sosial merupakan dinas yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas dan tugas pembantuan di bidang sosial. Dinas sosial selaku dinas yang menangani masalah sosial harus mampu berperan secara maksimal untuk memperdayakan para penyandang disabilitas terutama yang telah memasuki tahap produktif dalam hidupnya. Sehingga selain dapat mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat pengemis di kabupaten probolinggo serta dapat meningkatkan taraf kemandirian penyandang disabilitas itu sendiri. Adapun bentuk pemberdayaan yang dilakukan adalah pelatihan keterampilan seperti menjahit, membuat sabun cuci piring, dan membuat keset, pendidikan, bimbingan, ataupun bantuan-bantuan yang berupa fisik atau non fisik

Fokus masalah yang diteliti dalam sekripsi ini adalah: 1) Apa peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Disabilitas di Kabupaten Probolinggo? 2) Bagaimana bentuk pemberdayaan Dinas Sosial terhadap Disabilitas di Kabupaten Probolinggo? 3) Apa faktor penghambat Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Disabilitas di Kabupaten Probolinggo?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Disabilitas di Kabupaten Probolinggo. 2) Untuk mengetahui Bentuk Pemberdayaan Dinas Sosial terhadap Disabilitas di Kabupaten Probolinggo. 3) Untuk mengetahui hambatan Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Disabilitas di Kabupaten Probolinggo.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan situasi tertentu berdasarkan data yang diperoleh di lapangan secara terperinci. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi langsung di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo. Dalam pemilihan informan penulis menggunakan *puspositive sampling*.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Peran Dinas Sosial terhadap Pemberdayaan Disabilitas yaitu dengan pemberian program bimbingan dan dukungan agar penyandang disabilitas mampu menjalankan peran dan tugas kehidupan. Seperti dengan pemberian kegiatan berupa pelatihan keterampilan seperti menjahit, membuat sabun cuci piring, dan membuat keset, pendidikan, bimbingan, ataupun bantuan-bantuan yang berupa fisik atau non fisik. 2) Bentuk pemberdayaan Dinas Sosial untuk mensejahterakan kaum yang lemah khususnya penyandang disabilitas sedikit banyak telah dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah. Baik itu melalui peminjaman modal, pembinaan, pendidikan, inklusi, pengembangan karakter, dan lain-lain. 3) Beberapa faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan Disabilitas di kabupaten Probolinggo yaitu Banyaknya pemain (aktor) yang terlibat Terdapatnya komitmen atau loyalitas ganda, Kerumitan yang melekat pada program itu sendiri, Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak, Jarak yang luas.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Fokus penelitian .....	6
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Definisi istilah .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian terdahulu.....	13
B. Kajian teori .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	38
B. Lokasi Penelitian .....	39
C. Subyek Penelitian .....	40
D. Teknik Pengumpulan data .....	42

E. Analisis Data .....	45
F. Keabsahan Data .....	46
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	48
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	52
B. Penyajian Data dan Analisis.....	67
C. Pembahasan Temuan.....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. .Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal.
1.1 Pengklasifikasikan penyandang disabilitas .....	27
1.2 Sumber Data wawancara.....	31
1.3 Presentase Mata Pencaharian Penduduk Kab Probolinggo.....	44
1.4 Komposisi Pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	48
1.5 Komposisi Pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo Berdasarkan Jabatan.....	49
1.6 Stuktur dan Vsi Misi Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.....	49
1.7 Data Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Probolinggo Per Juli 2019.....	55

**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah swt dengan kesempurnaan luar biasa. Karena adanya komponen-komponen yang melekat pada diri manusia khususnya adalah akal. Sehingga dari sinilah perbedaan manusia dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah Swt yang lainnya. Hal ini dipertegas dalam firman Allah Swt dalam QS A-Tin ayat 4.<sup>1</sup>

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

Artinya : “Sesungguhnya Kami Telah Ciptakan Manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya” (QS At Tin 95: ayat 4)

Penjelasan QS A-Tin ayat 4 ini, memberikan pandangan bahwasanya manusia diciptakan sama tidak ada porsi yang membedakan antara satu dengan yang lainnya kecuali bertaqwanya manusia kepada sang pencipta. Meskipun begitu manusia juga memiliki kekurangan dalam dirinya yaitu tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk berinteraksi. Atau yang biasa disebut dengan makhluk sosial ataupun bermasyarakat. Sehingga sangatlah jelas ketika manusia dipandang dalam prespektif agama adalah makhluk sempurna, tetapi dalam prespektif sosial manusia membutuhkan orang lain untuk menjalani kehidupan ditengah-tengah masyarakat.

---

<sup>1</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta:2009), 4:95

Walaupun demikian, terdapat pula ditengah-tengah kalangan masyarakat tertentu yang tidak bisa menerima manusia sebagai mana mestinya, walaupun fundamen manusia sendiri adalah makhluk sosial. Yaitu kalangan masyarakat dengan keterbatasan mental ataupun fisik yang dialaminya. Baik yang dialami seorang sejak lahir maupun kecacatan dikarenakan kecelakaan. Seperti halnya para penyandang disabilitas.

Disabilitas adalah keadaan yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang. Dalam istilah penyandang disabilitas sering digunakan untuk menyebut sekelompok masyarakat yang memiliki gangguan mental, kelainan atau bahkan kehilangan fungsi organ tubuhnya. Kelompok penyandang disabilitas sendiri terbagi menjadi tiga golongan yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas fisik dan mental. Dengan keterbatasan yang dimiliki inilah membuat sebagian besar penyandang disabilitas sering dikucilkan ditengah-tengah masyarakat. Karena masyarakat berasumsi bahwa penyandang disabilitas tidak akan mampu melakukan pekerjaan seefektif orang-orang normal lainnya. Padahal kecacatan yang dimiliki penyandang disabilitas bukan menjadi penghalang untuk memperoleh hak-haknya baik dalam konteks manusia sebagai makhluk sosial dan hak untuk mempertahankan hidupnya.

Penyandang disabilitas sendiri sebenarnya tidak begitu berbeda dengan masyarakat umumnya. Karena para penyandang disabilitas ditengah-tengah masyarakat cenderung mengalami diskriminasi dalam

kehidupan sehari-hari oleh karena lingkungan fisik dan sosial yang tidak inklusif artinya, lingkungan dimana para penyandang disabilitas berada cenderung tidak mendukung aktualisasi dari potensi yang dimiliki. Sehingga para penyandang disabilitas memiliki beban masalah. Baik secara psikis, merasa rendah diri, tidak percaya diri, isolatif, mengalami kecanggungan dalam melakukan fungsi sosialnya, tidak mampu bergaul secara wajar, dan tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Dari beban yang dimiliki inilah para kaum penyandang disabilitas bergantung kepada orang lain dan tidak mampu untuk mandiri. Yang mengakibatkan para penyandang disabilitas berada dalam kondisi ekonomi lemah. Adapun faktor yang mendasar juga yaitu tidak adanya para penyedia lapangan pekerjaan khususnya bagi para penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil pendataan jumlah penyandang disabilitas pada 9 provinsi di Indonesia sebanyak 299.203 jiwa. Sekitar 67,33% disabilitas dewasa tidak memiliki keterampilan dan pekerjaan. Jenis keterampilan umumnya hanyalah sebagai tukang pijat, pertukangan, petani dan buruh.<sup>2</sup> Begitupun jumlah disabilitas di kabupaten probolinggo dengan beragam penderita disabilitas pada tahun 2019 berjumlah 7639 data tersebut menjelaskan bahwa mayoritas kelompok disabilitas tidak memiliki peluang berkerja, itu berarti secara tidak langsung kelompok disabilitas kehilangan haknya dalam bernegara. Peluang atau kesempatan untuk

---

<sup>2</sup> Hargio santoso, *Cara Mendidik Dan Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012), 12.

memiliki pekerjaan merupakan salah satu hak setiap warga dalam suatu Negara.

Menurut Undang-Undang Nomer 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

“Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermanfaat”<sup>3</sup>

Sehingga dari sini pemerintah harus hadir untuk para penyandang disabilitas baik dari tingkat pusat samapai kepada daerah kota/kabupaten dalam memberikan kesetaraan yang sama utamanya hak sebagai warga negara. Baik dari segi pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya ataupun memberikan bantuan-bantuan baik berupa fisik atau non fisik. Dalam hal ini peran terbesar terletak kepada pemerintah daerah, sebagai aktor yang berperan dalam menanggulangi kesejahteraan sosial.

Di kabupaten probolinggo, kesejahteraan disabilitas masih terbilang kurang karena rata-rata disabilitas memiliki ekonomi rendah. Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu kurangnya lapangan pekerjaan yang merekrut para penyandang disabilitas untuk di pekerjakan.

---

<sup>3</sup> *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dan Penegasan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, (Lembaga Presiden Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)

baik dalam lingkup pemerintahan atau perusahaan sendiri. Sehingga faktor seperti ini menjadi permasalahan bagi penyandang disabilitas. Maka tidak heran para penyandang disabilitas masih membutuhkan belas kasih orang lain dalam mengatasi ekonomi keluarga. Permasalahan seperti ini pemerintah harus hadir sebagai pelaksana undang-undang khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Adapun instansi yang menangani hal tersebut yaitu dinas sosial.

Dinas sosial merupakan dinas yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas dan tugas pembantuan di bidang sosial.<sup>4</sup> Dinas sosial selaku dinas yang menangani masalah sosial harus mampu berperan secara maksimal untuk memperdayakan para penyandang disabilitas terutama yang telah memasuki tahap produktif dalam hidupnya. Sehingga selain dapat mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat pengemis bagi penyandang disabilitas.

Pemberdayaan dari dinas sosial terhadap penyandang disabilitas salah satunya dengan cara mendayagunakan untuk dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki melalui pembinaan dan pelatihan yang intensif, sehingga mereka nantinya mempunyai bekal untuk hidup secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Pemberdayaan bagi penyandang disabilitas merupakan suatu upaya untuk membantu meringankan beban dalam mencapai kesejahteraannya. Memberdayakan penyandang

---

<sup>4</sup> [dinsos.probolingokab.go.id](http://dinsos.probolingokab.go.id)



disabilitas dilakukan untuk meningkatkan harkat dan mertabat penyandang disabilitas yang berada dalam kondisi lemah atau proses memampukan dan memandirikan disabilitas dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Upaya kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh dinas sosial Kabupaten Probolinggo mengenai masalah penyandang disabilitas berupa pelatihan keterampilan. Seharusnya kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan setahun sekali, dan semestinya bentuk pelatihannya diperluas tidak hanya pelatihan keterampilan namun bisa juga dengan kegiatan pemberdayaan yang memberikan akses atau peluang kerja yang sesuai dengan minat dan bakat penyandang disabilitas.

Menurut hasil pra riset peneliti menemukan fakta bahwa pada usia diatas 18 tahun, ditemukan penyandang disabilitas yang hanya dijadikan objek oleh keluarga untuk mengharapkan belas kasih dari orang lain. selain itu juga, peneliti menemukan bahwa penyandang disabilitas pada usia 18 tahun yang mulai memasuki tahap produktif hanya berada di rumah, sehingga menjadi beban bagi keluarga. Berdasarkan urian diatas, penulit tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Probolinggo”

## **B. Fokus Penelitian**

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditetapkan fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Apa peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Disabilitas di Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana bentuk pemberdayaan Dinas Sosial terhadap Disabilitas di Kabupaten Probolinggo?
3. Apa faktor penghambat Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Disabilitas di Kabupaten Probolinggo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian<sup>5</sup>. Hal ini harus mengacu pada masalah-masalah sesuai dengan fokus masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Adapun tujuan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Disabilitas di Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk mengetahui Bentuk Pemberdayaan Dinas Sosial terhadap Disabilitas di Kabupaten Probolinggo.
3. Untuk mengetahui hambatan Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Disabilitas di Kabupaten Probolinggo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini berisi tentang kontribusi proses peneliti yang didapatkan setelah melaksanakan penelitian. Manfaat penelitian ini dapat

---

<sup>5</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

berupa manfaat secara teoritis dan manfaat praktis, tidak hanya itu penelitian juga harus realistis, dari penjabaran tersebut maka tersusunlah manfaat penelitian yaitu sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak, khususnya bagi pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang diangkat serta dapat memperkaya wawasan ilmu pengetahuan tentang Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Disabilitas Di Kabupaten Probolinggo

#### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Biasanya manfaat praktis tidak hanya satu obyek tetapi lebih dari satu obyek. Adapun manfaat praktis diantaranya.

##### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman kepada peneliti dalam penulisan karya ilmiah terkait tentang Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Disabilitas Di Kabupaten Probolinggo.

##### b. Bagi Lembaga Dinas Sosial

Dapat memberikan wawasan dan masukan bagi lembaga Dinas Sosial sebagai bahan acuan untuk meningkatkan peran dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas.

c. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi seluruh aktivitas akademik untuk menggali lebih dalam suatu kompetensi maupun wawasan pengetahuan serta untuk referensi bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan peran dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

d. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang aktual kepada masyarakat dan kesadaran masyarakat mengenai penyandang disabilitas.

## **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah digunakan sebagai acuan peneliti untuk menghindari adanya kesalah-tafsiran dalam menginterpretasi isi dari karya tulis ini. Maka dari itu peneliti perlu menjelaskan dan menegaskan definisi dari setiap kata-kata yang mendukung judul pada penelitian ini menurut pemahaman peneliti dengan dikuatkan oleh teori yang ada. Adapun pengertian dari setiap variabelnya adalah sebagai berikut.

### **1. Peran**

Peran yaitu bertindak. Secara etimologi peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan

dimasyarakat.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Friedman, peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal.

## 2. Dinas sosial

Dinas Sosial adalah unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Dinas sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang diberikan kepada daerah di bidang sosial.

## 3. Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata daya, bermakna kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak, kekuatan, tenaga (yang menyebabkan sesuatu bergerak dan sebagainya).

## 4. Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan secara fisik, intelektual, mental, dan memiliki hambatan serta kesulitan dalam melakukan aktivitas seperti orang pada umumnya.

Dari definisi istilah di atas dapat dipahami dari judul yang diteliti oleh penulis adalah peran merupakan semua yang diharapkan kedepannya dapat memberi pengaruh pada seluruh masyarakat atau lingkungan yang dilakukan oleh seseorang karena status atau kedudukan yang dimilikinya.

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), .667.

## **F. Sistematika Bahasan**

Sistematika pembahasan merupakan rangkuman sementara dari isi skripsi yang bertujuan untuk mengetahui secara global dari seluruh pembahasan yang ada. Bagian pada sistematika pembahasan ini dimaksud untuk menunjukkan pengorganisasian atau garis besar dalam penelitian ini sehingga akan lebih memudahkan dalam menanggapi isinya. Masing-masing bab ini disusun dan dirumuskan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I** pada bab I berisi terkait pendahuluan, yang memuat dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini dijelaskan terkait gambaran umum study case yang akan dijadikan sebuah penelitian, yakni gambaran secara umum terkait dengan judul penelitian.

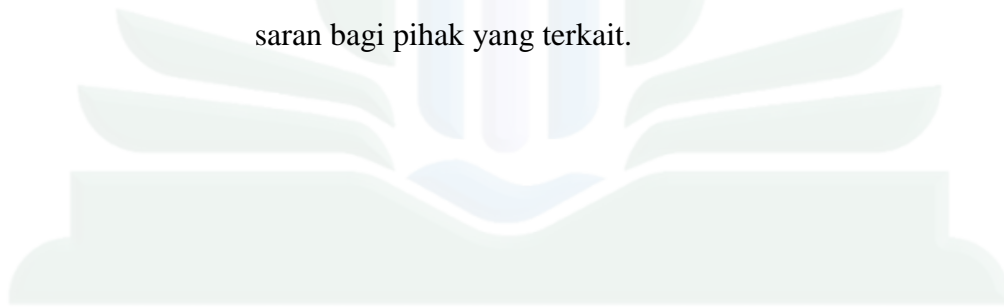
**BAB II** Pada bab II berisi uraian terkait Kajian pustaka, yang berisi tentang kajian kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan dan berisi uraian terkait pembahasan teori yang dijadikan prespektif oleh peneliti.

**BAB III** Berisi Metode penelitian, yang berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik

penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap penelitian.

**BAB IV** Pada bab IV ini diuraikan terkait penyajian data dan analisis data, yang berisi tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data, dan analisis serta pembahasan temuan peneliti yang diperoleh dalam penggunaan metode yang diterapkan.

**BAB V** Bab ini berisi penutup, berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan yang telah di uraikan, sekaligus penyampaian saran bagi pihak yang terkait.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk menambah wawasan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti sebagai pembanding hasil penelitian untuk dijadikan landasan atau pedoman dalam mengkaji masalah dalam penelitian. Penelitian terdahulu ini membantu peneliti untuk menemukan inspirasi serta dapat menjamin orisinalitas dan posisi peneliti yang akan dilakukan. Dalam hal ini peneliti mengambil beberapa skripsi yang telah disetujui dan dipublikasikan. Skripsi tersebut berhubungan dengan *korban kekerasan seksual* yang sesuai dengan judul penelitian ini.<sup>7</sup>

1. Lamuji, 2019 Universitas Islam Negeri Intan Lampung dengan judul “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh Batik Tulis Shihaali di Kampung Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang”.<sup>8</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedang fokus penelitian pada skripsi ini yaitu:
  - a. Bagaimana proses pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas di Batik Shihaali?
  - b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program membatik di Batik Tulis Shihaali?

---

<sup>7</sup> Tim penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember :IAIN Press,2016), 52.

<sup>8</sup> Lamuji, *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh Batik Tulis Shihaali Di Kampung Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Intan Lampung, 2019).



c. Bagaimana hasil yang di capai dalam program pemberdayaan melalui keterampilan membatik di Batik Tulis Shahaali?

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa didalam program pemberdayaan disabilitas melaksanakan program Keterampilan Membatik di Batik Tulis Shihaali ini seperti di awal terlaksananya program yayasan menyediakan pelatih khusus membatik Sejalannya waktu untuk para penyandang disabilitas belajar membatik secara di berikan pelatihan. Mereka belajar dari yang sudah berpengalaman dan mendapatkan ilmu dan dapat mengembangkan potensi. Mereka cepat menangkap apa yang diajarkan oleh yang sudah berpengalaman dalam hal membatik karena sistem belajar membatik di Batik Tulis Shihaali bukan dalam hal pemberian teori seperti di dalam kelas melainkan praktek langsung. Beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam program keterampilan membatik di Batik Tulis Shihaali diantaranya adalah faktor pendukung seperti adanya komite dan donatur, penjualan produk, tersedianya fasilitas sarana dan prasarana dan Sedangkan faktor penghambatnya seperti awal mengikuti keterampilan membatik masih kesulitan dalam bahan baku membatik dan dalam pewarnaan batik yang masih menggunakan kuas. Hasil dari pelaksanaan program Keterampilan Membatik ini pun dapat dilihat dari segi pengetahuan dan skill membatik dari masing-masing penyandang disabilitas.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang pemberdayaan disabilitas.

Perbedaan dari penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan objek penelitian

2. Wuri Solikhatun, 2015 UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta dengan judul “Peran Badan Sosial Dalam Pemberdayaan Difabel Netra Di Yogyakarta”<sup>9</sup> Penelitian Ini Menggunakan Pendekatan Kualitatif, sedangkan rumusan masalah pada sekripsi ini yaitu:
  - a. Bagaimana peran badan social mardiwuto dalam pemberdayaan difabel netra di Yogyakarta?
  - b. Bagaimana dampak dari program pemberdayaan badan social mardiwuto terhadap difabel netra Yogyakarta?

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penelitian ini menemukan bahwa Badan Sosial Mardiwuto sebagai salah satu lembaga pengembang masyarakat dalam pemberdayaan difabel netra di Yogyakarta memiliki peran penting peran tersebut ialah peran fasilitatif dan peran kependidikan. Dari dua peran tersebut menghasilkan berbagai program pemberdayaan, diantaranya berbagai macam bentuk pelatihan keterampilan mulai dari pelatihan komputer bicara, pelatihan bahasa ingglis, keterampilan tataboga, keterampilan massage/pijat dan lain sebagainya. Disamping itu pula, pihak Badan Sosial Mardi Wuto berupaya menghubungkan antara para donatur kepada difabel netra dalam memberikan berbagai macam pelayanan social berupa penyediaan alat bantu difabel netra, memberikan zakat fitrah bagi difabel netra yang

---

<sup>9</sup> Wuri Sholihatun, Peran Badan Sosial Mardiwuto Dalam Pemberdayaan Difabel Netra Di Yogyakarta, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

membutuhkan, memberikan bantuan beasiswa untuk anak didik, selain itu Badan Sosial Mardi Wuto juga mendirikan koperasi simpan pinjam bagi difabel netrayang membutuhkan, membuka kesempatan kerja bagi difabel netra sebagai masir di Badan Sosial Mardi Wuto dan lain sebagainya. Dampak dari pelaksanaan pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Badan Sosial Mardi Wuto ialah dampak internal tunanetra yakni dari dalam diri tunanetra yang mengikuti program pemberdayaan di Badan Sosial Mardi Wuto. Adapun dampak bagi tunanetra diantaranya ialah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti mampu meningkatkan intelektual, menambah pendapatan guna memenuhi kebutuhan

sehari-hari dan lain sebagainya. Dampak eksternal atau dari luar diri tunanetra, diantara dampak bagi lingkungan atau masyarakat ialah ikut serta dalam pembangunan secara bersama-sama, menciptakan citra baik dikalangan masyarakat luas dan adanya saling membutuhkan antar sesama.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan membahas tentang pemberdayaan. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan objek penelitian

3. Fitria Reskiawati, 2017 UIN Alauddin Makassar dengan judul Pola Pembinaan Penyandang Disabilitas pada panti sosial Bina Daksa Wira

Jaya Makassar.<sup>10</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif Diskritif dengan menggunakan pendekatan Sosiologi Komunikasi, metode pengumpulan data dengan wawancara, Observasi, dan Dokumentasi berupa foto-foto pelaksanaan pembinaan Penyandang Disabilitas Tubuh. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pola pembinaan penyandang disabilitas dengan daksa Wira Jaya (PSPDW) Makassar?
- b. Bagaimana metode pembinaan penyandang disabilitas tubuh pada panti sosial Bina Daksa Wira Jaya (PSPDW) Makassar?
- c. Apa Faktor penunjang dan penghambat Pembinaan disabilitas tubuh pada panti sosial dengan daksa Wira Jaya (PSPDW) Makassar?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola pembinaan penyandang disabilitas tubuh panti sosial bina daksa wirajaya Makasar yaitu melalui pendekatan awal, assessment, rencana intervensi sosial, rehabilitasi sosial, bimbingan resosialisasi, intervensi, terminasi dan bimbingan lanjutan. Adapun metode pembinaan penyandang disabilitas tubuh pada panti sosial bina daksa wirajaya Makasar dengan cara pembinaan individu dan kelompok. Ada beberapa faktor penunjang dan penghambat pada panti sosial bina daksa wirajaya Makasar dalam melaksanakan pembinaan terhadap penyandang disabilitas. Faktor penunjang adalah fasilitas dan sarana dan prasarana yang lengkap, SDM yang terlatih, dukungan dari beberapa pihak terkait. Sedangkan faktor menghambatnya

---

<sup>10</sup> Fitria Reskiawati, Pola Pembinaan Penyandang Disabilitas Tubuh Pada Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makasar, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Makasar, 2017)

adalah perbedaan latar belakang pendidikan dan intelektual, penerima manfaat tidak serentak masuk di PSBDW Makasar, dan faktor etika atau psikolog.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan membahas tentang pemberdayaan. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan objek penelitian.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Peran**

#### **a. Pengertian Peran**

Peran berarti laku atau tindakan. Secara etimologi peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh seorang yang berkedudukan dimasyarakat.<sup>11</sup> Sedangkan definisi lain peran adalah konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok masyarakat sebagai organisasi atau individu yang penting bagi struktur sosial.<sup>12</sup>

Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan dan peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan historis. Menurut penjelasan historis, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 667

<sup>12</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1997), 147.

dibawakan oleh seorang actor dalam sebuah pentas dalam lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan

fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Adapun beberapa dimensi peran:

- 1) Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat peran merupakan suatu kebijakan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- 2) Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- 3) Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan informasi dalam proses pengambilan keputusan. Presepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang reponsif dan reponsibel
- 4) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesnsus dari pendapat-pendapat yang ada. Asu,si yang melandasi presepsi ini adalah bertukuar

pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.<sup>13</sup>

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwasanya berbicara peran adalah berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitanya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mempuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.

#### b. Macam-macam Peran

Seorang individu ataupun lembaga dalam mengembangkan kapasitas pelaku masyarakat agar mampu mengorganisir dan menentukan kemandirian hidupnya. Memiliki beberapa peran yang harus dilakukan dalam pengembangan pelaku masyarakat, beberapa peran tersebut yaitu:

##### 1) Mengorganisasi

Menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero mengungkapkan bahwa salah satu peran dalam pemberdayaan adalah dengan mengorganisasi yaitu peran yang harus dilakukan oleh pekerja

---

<sup>13</sup> Horoepetri, Arimbi, Achmad Santoso, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*, (Jakarta: Walhi, 2003), 67.

sosial untuk melibatkan kemampuan berfikir masyarakat secara bersama-sama dalam melakukan pembangunan, yaitu memlaui apa yang butuh untuk diselesaikan tanpa harus melakukannya seorang diri, namun dilakukan secara bersama-sama untuk memudahkan pekerjaan yang harus dilakukan.<sup>14</sup>

## 2) Fasilitator

Fasilitator yaitu peran-peran yang dilakukan oleh seorang pengembang masyarakat dengan cara memberikan stimulan dan dukungan kepada masyarakat. Peran ini meliputi, *pertama* membangun kesepakatan yakni membuat kesepakatan bersama-sama dengan melalui form pertemuan, dimana pada kesepakatan tersebut harus mendapat persetujuan dari pihak yang terlibat.<sup>15</sup> *Kedua*, menurut persons jorgensesns dan hermandez yang dikutip oleh Edi Soeharto mengungkapkan bahwa salah satu peran fasilitator yaitu dorongan melaksanakan tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Dimana dorongan itu harus dilakukan agar masyarakat dapat melakukan dan selalu mempunyai semangat dalam menyelesaikan kegiatan yang berlangsung.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), 576.

<sup>15</sup> Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta, penerbit TERAS 2009), 72.

<sup>16</sup> Edi Soeharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 98.



### 3) Pendidikan

Pendidikan yaitu peran-peran kependidikan kepada masyarakat. Dalam pengembangan masyarakat terjadi proses pembelajaran secara terus-menerus dari masyarakat maupun pekerja kemasyarakatan untuk selalu memperbaiki keterampilan dan cara berfikir masyarakat agar dapat berkembang dan menjadi lebih baik.<sup>17</sup>

### 4) Keterampilan Teknik

Keterampilan teknik yaitu pengembangan masyarakat dalam menerapkan keterampilan dalam mengembangkan masyarakat. Beberapa dimensi pekerjaannya yakni pemakaian komputer, penyajian laporan secara lisan dan tertulis, penanganan proyek pembangunan secara fisik dan lainnya, yang mana semuanya itu sangat membutuhkan keterampilan teknis.<sup>18</sup>

### 5) Perwakilan

Perwakilan yaitu peran yang dilakukan oleh pengembangan masyarakat dalam interaksinya dengan lembaga luar atas nama masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Dimana setelah mendapatkan hasil dari interaksi yang dilaksanakan, maka orang pengembangan masyarakat harus menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat. Peran

---

<sup>17</sup> Aziz Muslim, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Samudra Biru 2012), 248.

<sup>18</sup> Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta, Penerbit TERAS 2009), 73.

perwakilan ini meliputi usaha mendapatkan sumber-sumber, sharing pengalaman dan pengetahuan serta jadi juru bicara masyarakat.

## **2. Dinas Sosial**

Dinas Sosial adalah unsur yang terdapat didalam pemerintahan yang notabennya yaitu mengurus suatu kegiatan dalam membantu individu, kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam fungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan.

Kedudukan Dinas Sosial sendiri adalah sebagai pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan tanggung jawab kepada walikota/bupati melalui sekretaris daerah.

Adapun tugas dinas sosial yaitu menjalankan program pemerintah daerah di bidang sosial dan kewenangan dekonstrasi serta tugas pembantu yang diberikan pemerintah. Sedangkan fungsi dari dinas sosial itu sendiri tercantum pada ayat (1) dimana memiliki fungsi:

- a. menyusun program dan pengenalan sosial.
- b. perumusan kebijakan teknis bidang sosial.
- c. pengelolaan rehabilitasi dan perlindungan sosial, bantuan, dan jaminan sosial, pengembangan sosial serta partisipasi sosial masyarakat
- d. pemberian fasilitas penyelenggaraan sosial Kabupaten/Kota.

- e. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya.
- f. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dibidang sosial.
- g. pemanfaatan nilai-nilai, norma dan tradisi luhur dalam penanganan masalah sosial.
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.
- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas, dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi.<sup>19</sup>

### 3. Pemberdayaan

#### a. Pengertian Pemberdayaan

Secara etomologis pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan, atau kemampuan dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.<sup>20</sup>

Pemberdayaan dalam bahasa arab disebut sebagai *tamkin*. Kata *tamkin* dalam kamus-kamus besar merupakan bentuk mashdar dari *fiil* (kata kerja) makna. Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (empowement) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat.<sup>21</sup> Sumodiningrat mengartikan keberdayaan masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan

<sup>19</sup> [dinsos.probolinggokab.go.id](http://dinsos.probolinggokab.go.id)

<sup>20</sup> Ambar Teguh Sulistyani, *Kemitraan dan Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gaya Gava Media, 2004), 77.

<sup>21</sup> Universitas Islam Indonesia, *Al Qurán dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), 14.

masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al- A'raf ayat 10 bahwa telah menempatkan manusia di muka bumi dan telah menjadikan penghidupannya di dunia. Ayat ini kaitannya dengan tamkin (pemberdayaan) adalah manusia telah diciptkan oleh Allah di bumi agar berusaha.

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.”(QS. Al-A'raf (7: 10).

Allah Swt berfirman guna mengingatkan hambanya akan anugrah yang telah diberikan kepada mereka yaitu menjadikan bumi berikut segala kebaikan yang terdapat didalamnya, usaha dan manfaat yang menjadi sarana penghidupan mereka. Walaupun anugrah Allah demikian banyak akan tetapi sedikit sekali yang bersyukur.<sup>22</sup> Selain itu pemberdayaan juga berasal dari bahasa inggris “*empower*” yang menurut marriam webster dan oxford english dictionary mengandung dua pengertian yaitu *to give power or authority to* atau

<sup>22</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2, Cetakan ke-2*, (Jakarta:Gema Insani, 2007), 340.

memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas ke pihak lain sedangkan pengertian yang ke dua yaitu *to give ability to or enable* atau upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.<sup>23</sup>

Pemberdayaan adalah sebuah ‘‘proses menjadi’’ bukan sebuah ‘‘proses instansi’’. Sebagai proses pemberdayaan mempunyai 3 tahap yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan pemberdayaan.<sup>24</sup> Pemberdayaan pada akhirnya bukanlah sekedar teori sebagaimana dikatakan Ron Johnson dan David Redmond (the art of empowerment, 1992) bahwa *at last, empowerment is about art. It is about value we believe*. Tatkala pemberdayaan menjadi salah satu praktek dan seni, yang mengemukakan adalah bagaimana memejemini proses pemberdayaan.

Artinya pemberdayaan tidak boleh bermakna ‘‘merobotkan’’ atau ‘‘menyeragamkan’’. Pemberdayaan juga memberikan ruang pada pengembangan keberagaman kemampuan manusia yang beragam, dengan asumsi satu sama lain akan melengkapi. Pemberdayaan merupakan proses alamiah. Pemberdayaan merupakan konsep kehidupan proses alamiah, kehidupan itu perlu dan harus di manjemeni. Konsep manajemeni berbeda dengan rekayasa karena manajemen lebih fokus pada meningkatkan nilai

<sup>23</sup> Sabtimarlaia, ‘‘Pemberdayan Masyarakat Melalui Pengelolaan Desa Wisata’’, Dikutip Dalam Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2

<sup>24</sup> Randy R. Wrihatolono Dan Riant Nugroho Dwijowojoto, *Manajemen Pemberdayaan*, (Jakarta: PT. Elex Media Kopentindo, 2007), 2.

tambah suatu aset. Jadi pemberdayaan bukanlah semata mata konsep politik melainkan pada konsep suatu manajemen dan pada akhirnya pemberdayaan akan mempunyai indikator akan keberhasilan.<sup>25</sup>

b. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).<sup>26</sup>

Menurut Agus Ahmad Syafi'i, tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memandirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Karenanya pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.<sup>27</sup>

c. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat ada 5 (lima) aspek penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat,

---

<sup>25</sup> *Ibid*, 9

<sup>26</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta : LP FEUI,2002), 162.

<sup>27</sup> *Ibid*, 60

khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat, antara lain.<sup>28</sup>

#### 1) Motivasi

Dalam hubungan ini setiap keluarga harus dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Karena itu, setiap rumah tangga perlu didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa atau kelurahannya.

Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri.

#### 2) Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan.

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, perbaikan kesehatan, imunisasi dan sanitasi. Sedangkan keterampilan vokasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Pengetahuan lokal yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat untuk menciptakan mata pencaharian sendiri atau

---

<sup>28</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2014), 104.

membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya.

### 3) Manajemen diri

Setiap kelompok-kelompok harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemimpinan masyarakat. Pada tahap awal, pendampingan dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem. Kelompok kemudian dapat diberi wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.

### 4) Mobilisasi sumber daya

Untuk memobilisasi sumber daya masyarakat, diperlukan pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Ide ini didasari pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang jika dihimpun dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota memiliki



kesempatan yang sama. Hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan.

5) Pembangunan dan pengembangan jejaring.

Pengorganisasian kelompok - kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan bagi para anggotanya membangun dan mempermudah jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras matra pemberdayaan (*empowerment setting*) mikro, mezzo, dan makro.

a) Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress manajemen, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).

b) Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok. Biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran,

pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

- c) Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar, karena perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat.<sup>29</sup>

b. Jenis Pemberdayaan

Berikut ini macam-macam bentuk pemberdayaan yang ada di masyarakat, antara lain:

1) Pemberdayaan Ekonomi

Secara sederhana, pemberdayaan ekonomi berkaitan dengan bagaimana orang bekerja untuk menciptakan kekayaan.

Pemberdayaan ekonomi adalah kemampuan untuk membuat dan bertindak atas keputusan yang melibatkan kontrol dan alokasi sumber daya keuangan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat

---

<sup>29</sup> *Ibid*, 66

yang secara swadaya dalam mengelolah sumberdaya apapun yang bisa dikuasainya, dan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya. Upaya pembangunan ekonomi masyarakat mengarah pada perubahan struktur yaitu memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional.

## 2) Pemberdayaan Politik

Pemberdayaan politik berkaitan dengan semua hal yang kita lakukan untuk mengatur diri kita sendiri dan membuat keputusan. Secara umum dikatakan bahwa mendukung orang untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk pengembangan kebijakan yang mencerminkan kebutuhan dan kepentingan orang miskin. Mempromosikan partisipasi politik adalah cara penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan daya tanggap negara, dan memberdayakan orang miskin. Ini dapat mencakup serangkaian pendekatan, termasuk memperkuat kewarganegaraan yang demokratis, mempromosikan keterlibatan antara negara dan masyarakat sipil, mempromosikan akses ke informasi, dan memperkuat asosiasi warga.

## 3) Pemberdayaan Budaya

Pemberdayaan budaya berkaitan dengan hal-hal dalam kehidupan sehari-hari seperti makanan, bahasa, pakaian,

kepercayaan spiritual, dan ide. Pemberdayaan budaya adalah mengetahui sejarah dan latar belakang Anda dan bangga pada diri sendiri, karena “Orang yang tidak mengetahui asal sejarah dan budaya masa lalu seperti pohon tanpa akar”- marcus Garvey.

#### 4) Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan sosial berkaitan dengan semua yang dilakukan orang ketika mereka hidup, bekerja, dan bermain bersama. Pemberdayaan sosial dalam praktik luas didasarkan pada prinsip-prinsip kerja sosial dan pengembangan masyarakat. Pemberdayaan sosial biasanya dilaksanakan pada empat tingkat berikut.

- a) Tingkat individu-di mana orang menghargai dirinya sendiri dan secara aktif ingin berpartisipasi dalam kehidupan.
- b) tingkat keluarga
- c) Tingkat masyarakat
- d) Kebijakan sosial tingkat yang berdampak pada tindakan tingkat lokal dan nasional untuk mempromosikan kesetaraan sosial dari arti ketimpangan sosial. Sesungguhnya ini adalah wujud inklusi untuk semua orang.

#### 5) Pemberdayaan Nasional

Pemberdayaan nasional berasal dari suatu negara yang memiliki kekuatan untuk membuat keputusan untuk dirinya sendiri.

#### 4. Disabilitas

Disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Disabilitas atau Cacat (bahasa Inggris: *disability*) dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya.<sup>30</sup> Kata istilah yang diletakkan pada para penyandang cacat selama ini lebih banyak mengacu kepada kondisi ketidakmampuan, kelemahan, ketidakberdayaan, kerusakan dan makna lain yang berkonotasi negatif. Seperti tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, tuna grahita, dan bahkan kata cacat itu sendiri merupakan kata yang negatif. Tuna berarti hilang atau tidak memiliki, sedangkan cacat berarti rusak.<sup>31</sup>

Dalam menjelaskan pengertian disabilitas Undang-Undang telah memberikan pengertian bahwasanya, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelktual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara

---

<sup>30</sup> Departemen Sosial RI, *Panduan Kriteria Penyandang Cacat Fisik*, (Jakarta: Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Direktorat Sosial RI, 2006), 3.

<sup>31</sup> Jurnal Perempuan, *Mencari Ruang Untuk Difabel*, (Jakarta Selatan: Yayasan JYP Jurnal Perempuan, 18.

lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>32</sup> Dalam Undang-Undang yang dulunya adalah penyandang cacat kini diganti menjadi penyandang disabilitas.

Adapun pada dasarnya terdapat dua penyebab disabilitas ataupun kecacatan yaitu kecacatan yang terjadi sejak lahir ataupun bawaan, tetapi ada juga kecacatan yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja maupun kecelakaan lalu lintas. Namun demikian dari hasil seminar nasional Pengembangan Pendidikan Luar Biasa dan menurut Frieda Mangunsong dkk (1998) secara umum klasifikasi atau jenis kecacatan dapat dibagi atas:

- a. Penyandang Cacat Tubuh yang tergolong bagian D (SLB D) ialah seseorang yang menderita cacat polio atau lainnya. Sehingga mengalami ketidaknormalan dalam fungsi tulang, otot-otot atau koordinasi fungsi otot-otot. Akan tetapi pada umumnya mereka mempunyai kemampuan kecerdasan yang normal.
- b. Penyandang Cacat tubuh yang tergolong bagian D1 (SLB D1) ialah seseorang yang menderita cacat semenjak lahir akibat kerusakan otak seperti penderita cerebral palsy yang mengakibatkan tidak berfungsinya tulang, otot, sendi dan syaraf-syaraf sehingga terjadi kelumpuhan, kekakuan dan kurangnya koordinasi motorik. Akibat adanya gangguan pada otak, maka sebagian besar dari penderita ini

---

<sup>32</sup> Tim Indepth Rights PPRBM Malang, *Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, (Malang: CBM, 2016), 8.

mempunyai kemampuan kecerdasan yang tidak normal (di bawah rata-rata atau terbelakang).<sup>33</sup>

Dalam pembagian ragam penyandang disabilitas memiliki karakteristik yaitu fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini. Penyandang disabilitas tersebut dapat

diklasifikasikan menjadi disabilitas fisik, disabilitas mental/intelegensi, dan disabilitas ganda. Secara lebih detail.

**Tabel 2.1**

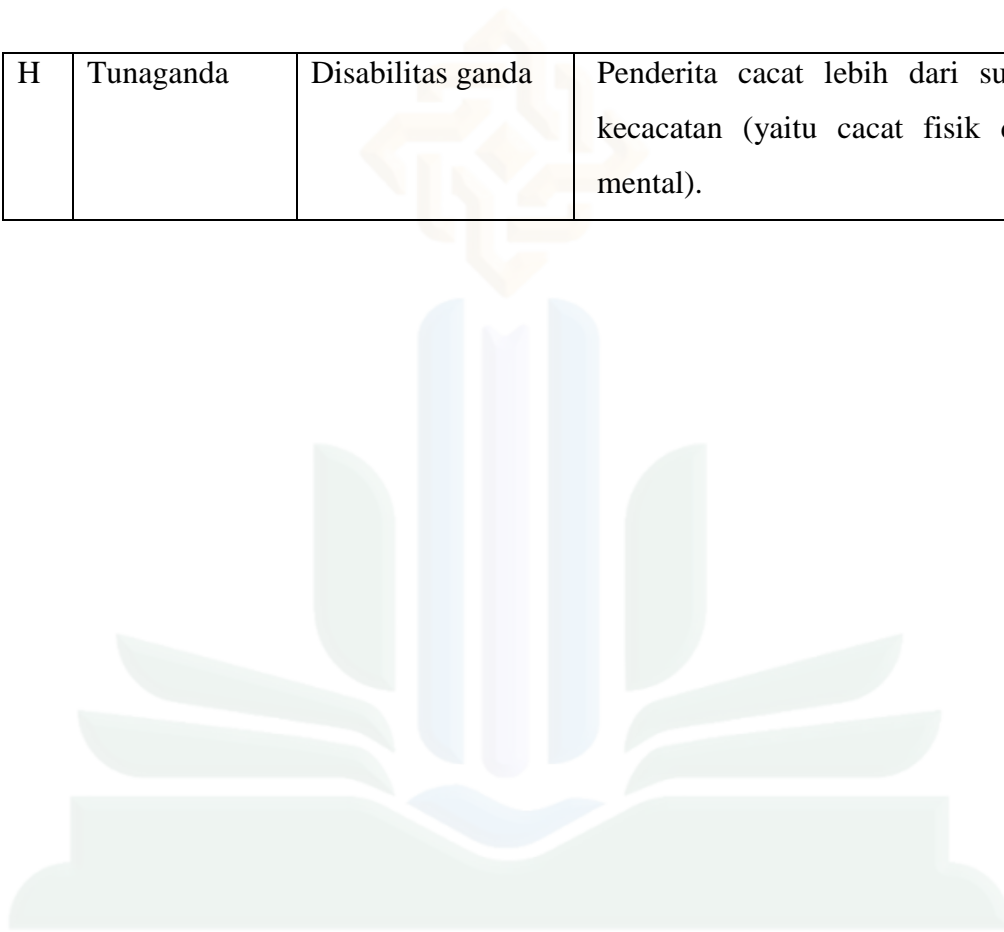
**Pengklasifikasikan Penyandang Disabilitas**

bisa dilihat dalam tabel berikut:

No	Nama	Jenis	Pengertian
A	Tunanetra	Disabilitas fisik	Tidak dapat melihat; buta
B	Tunarungu	Disabilitas fisik	Tidak dapat mendengar; tuli
C	Tunawicara	Disabilitas fisik	Tidak dapat berbicara; bisu
D	Tunadaksa	Disabilitas fisik	Cacat tubuh
E	Tunalaras	Disabilitas fisik	Cacat suara dan nada
F	Tunalaras	Disabilitas mental	Sukar mengendalikan emosi dan sosial
G	Tunagrahita	Disabilitas mental	Cacat pikiran; lemah daya tangkap; idiot

<sup>33</sup> Departemen Sosial RI, *Panduan Kriteria Penyandang Cacat Fisik*, (Jakarta: Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Direktorat Sosial RI, 2006), 11.

H	Tunaganda	Disabilitas ganda	Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental).
---	-----------	-------------------	---



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Dan Peneliti melakukan suatu langkah ataupun prosedur untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian.

Penelitian kualitatif, yaitu peneliti yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh obyek peneliti. Misalnya: perilaku prepsi, motivasi, tindakan kekerasan, dan lainnya. Adapaun ini secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>34</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk memfokuskan fenomena yang terjadi, berupa peran dan pemberdayaan disabilitas di dinas sosial kabupaten probolinggo.

Adapun Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada mayarakat.dan juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*)<sup>35</sup> Sehingga

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

<sup>35</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka cipta, 2013) 121.

penelitian ini melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk memfokuskan fenomena yang terjadi dilapangan, yang berupa peran dan pemberdayaan disabilitas di dinas sosial kabupaten probolinggo.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dan keadaan dimana peneliti dapat menangkap keadaan sebenarnya dengan obyek yang di teliti dalam rangka memperoleh data. Agar data yang di peroleh akurat, maka peneliti memilih sekaligus menetapkan waktu dan tempat seta suasana yang memungkinkan dalam upaya menggali keterangan atau data yang di butuhkan, pertimbangan agar memperoleh kemudahan dalam pengambilan data sesuai dengan tema penelitian. Dalam hal ini perlu di kemukakan tempat diamana situasi sosial tersebut akan di teliti.<sup>36</sup>

Penelitian ini di laksanakan di tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena Dinas sosial kabupaten Probolinggo merupakan tempat melaksanakan peran dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, yang mana hal ini sesuai dengan jurusan serta masalah judul yang di angkat.

Juga, Alasan dari Peneliti melakukan penelitian di Dinas sosial Kabupaten Probolinggo karena masalah sosial yang dialami oleh kabupaten probolinggo khususnya para penyandang disabilitas. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

---

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kualitatif Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta cv, 2018), 292.

### C. Subyek Penelitian

Pemilihan subyek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive*. *Purposive* adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya orang tersebut yang di anggap paling tahu tentang apa yang di diharapkan oleh peneliti.<sup>37</sup> Beberapa kriteria subyek pokok yang telah ditentukan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Subyek adalah seseorang yang telah menguasai dan memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, melainkan juga dihayati. Proses enkulturasi tersebut maksudnya adalah proses mempelajari sesuatu berdasarkan pengalaman yang diperoleh, sehingga menghasilkan pengetahuan yang tidak akan hilang meskipun dalam jangka waktu yang panjang.
2. Subyek adalah seseorang yang memiliki waktu atau kesempatan untuk dimintai informasi. Maksudnya adalah informan harus benar-benar seseorang yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan dan informasi penelitian kepada peneliti, sehingga penelitian yang dilakukan bisa selesai berdasarkan waktu yang telah ditentukan dan menghasilkan data yang valid sesuai informasi di lapangan.
3. Subyek adalah seseorang yang tidak menyampaikan informasi dari hasil mengarang. Seseorang yang dapat dikatakan pantas menjadi informan pokok adalah seseorang yang memberikan informasi

---

<sup>37</sup> Ibid.,218.

berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan tanpa adanya unsur dibuat-buat.

Dalam penelitian ini untuk pencairan data diperoleh dari informan dengan menggunakan tehknik *purposive* sampling yaitu pengambilan sampel sumber data, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan sebagai peneliti. subyek dari penelitian ini meliputi sampel tentang rehabilitasi sosial terhadap korban kekerasan seksual pada anak di dinas sosial kabupaten probolinggo.

Jenis sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.<sup>38</sup>

Pada penelitian ini beberapa data yang diperoleh untuk memperkuat penelitian ini dikelompokkan menjadi dua sumber data yaitu berupa data primer dan skunder, diantaranya:

a. Sumber data primer

Sumber data penelitian ini yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara. Diantaranya:

---

<sup>38</sup>Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-ruzz, 2016), 113.

**Tabel 2.2**  
**Sumber Data Wawancara**

No	Nama	Pendidikan terakhir	Jabatan
1.	Achmad Arif, SH.MH	S2	Kepala Dinas
2.	Dra. Titik Indayanti, M.M	S2	Kabid Perlindungan Rehapsos
3.	Samsul Hadi, S.sos	S1	Kasi Pelayanan d Rehabilitasi Sosial dan Disabilitas
4.	Herlin	-	Orang Tua Penyandang Disabilitas

b. Sumber data sekunder

Adapun sumber data yang dilakukan oleh penelitian ini juga berupa sumber data skunder, yang di peroleh melalui melalui media perantara, diantaranya:

- 1) Buku-buku yang berkaitan peran dan pemberdayaan
- 2) Buku-buku yang berkaitan dengan disabilitas
- 3) Jurnal dan UU yang berkaitan dengan masalah sosial yang diangkat.

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapat data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang di tetapkan.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung dengan suatu benda, kondisi, dan perilaku. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data. Observasi dapat di bedakan menjadi dua yaitu observasi partisipan dan non partisipan. Dimana peneliti datang ke tempat yang akan di teleiti, dengan tujuan untuk mengamati yang terjadi pada masalah sosial (disabilitas) tersebut. Pengamatan dari peneliti mengenai peran dan pemberdayaan dinas sosial kabupaten probolinggo terhadap para penyandang disabilitas.<sup>40</sup>

Data yang ingin diamati oleh peneliti dengan teknik observasi ini, Diantaranya:

- a. Profil Dinas sosial kabupaten probolinngo.
- b. Gambaran obyek penelitian.
- c. Proses peran dan pemberdayaan penyandang disabilitas
- d. Hasil dari pemberdayaan dinas sosial terhadap penyandang disabilitas.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga memeperoleh data yang diinginkan dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara itu di

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 343.

gunakan untuk memperoleh data yang diinginkan dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara di gunakan untuk memperoleh data dari informan dan mencatat serta merekam dari jawaban atau pertanyaan yang di perlukan oleh peneliti.<sup>41</sup> Wawancara dibagi menjadi dua yaitu:

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara Terstruktur adalah Wawancara yang pewawancaraannya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan pertanyaan yang akan di ajukan. pertanyaan pertanyaan ini telah disusun dengan rapi dan ketat.

b. Wawancara Tak Berstruktur

Wawancara tak berstruktur adalah peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis garis besar permasalahan yang akan di tanyakan.<sup>42</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara tak berstruktur. Adapun data yang telah di peroleh oleh peneliti:

- 1) Bagaimana peran dan pemberdayaan dinas sosial terhadap para penyandang disabilitas di kabupaten probolinggo?

---

<sup>41</sup> Mundir, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Jember: STAIN Press, 2013), 186.

<sup>42</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), 235.

- 2) Bagaimana proses pemberdayaan yang dilakukan oleh dinas sosial terhadap penyandang disabilitas di lingkungan kabupaten probolinggo?
- 3) Apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dinas sosial dalam melakukan peran dan pemberdayaan penyandang disabilitas di kabupaten probolinggo?

Penelitian ini dalam melakukan wawancara peneliti juga mendengarkan secara teliti dan cermat serta mencatat jawaban dari para narasumber.

#### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan lain lain.<sup>43</sup>

Data yang ingin didapat oleh peneliti dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu, berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen dan, rapat. Tidak hanya itu, peneliti ingin mengetahui subyek penelitian, tempat penelitian, antara pekerja sosial, para penyandang disabilitas, masyarakat ataupun orang tua dari penyandang disabilitas.

#### E. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dan tersusun, kemudian di analisis dengan teknik kualitatif, yaitu di peroleh saat pengumpulan data. Hasil

---

<sup>43</sup> Suharmi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Renske cipta,2002), 172.



analisis data di uraikan dalam paparan dan temuan peneliti. Maksudnya adalah proses analisa yang dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah sehingga kemudian hasil analisa data tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah proses analisa tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dan jalan membandingkan teori bandingan dan tujuan menemukan teori yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun nelemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumusan statistic<sup>44</sup>

Analisis dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap di peroleh data yang dianggap kredibel.

#### **F. Keabsahan Data**

Dalam bagian ini usaha yang akan di lakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data temuan di lapangan. Agar menjadi temuan yang absah, perlu di teliti dari kreadibilitasnya dengan menggunakan teknik keabsahan data. Keabsahan data merupakan drajat antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat di laporkan oleh peneliti.

---

<sup>44</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif*. (bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 41.

membedakan tiga macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan yaitu:

1. Triangulasi, dengan sumber data berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif,

Diantaranya:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda, orang pemerintahan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

2. Triangulasi dengan teknik, terdapat dua strategi yaitu:

- a. Pengecekan drajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data.

- b. Pengecekan drajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.<sup>45</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan 2 triangulasi, triangulasi sumber dan triangulasi teknik, agar data yang disajikan benar-benar objektif. Adapun Kebasahan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan. Langkah yang dilakukan yaitu mengkomulasikan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi. Dengan adanya perbandingan tersebut maka data yang dihasilkan akan bersifat obyektif dan valid.

Supaya dapat menguji kredibilitas data serta mengecek data dalam sumber tehnik yang berbeda, misalnya peneliti mewawancarai informan untuk menggali informasi terkait peran dinas soaial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo.

## **G. Tahap-tahap Penelitian**

Tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti meliputi 3 tahap yaitu tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian dan tahap penyelesaian. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

### **1. Tahap Pra Lapangan**

#### **a. Menyusun rancangan penelitian**

Dalam menyusun rancangan penelitian, peneliti melakukan beberapa hal diantaranya menentukan judul penelitian, latar belakang masalah, kajian kepustakaan, fokus masalah, tujuan

---

<sup>45</sup> Tim penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember :IAIN Press,2016), 47.

penelitian, manfaat penelitian, pemilihan lapangan, penentuan jadwal penelitian, pemilihan alat penelitian, dan rancangan pengumpulan data yang sesuai dengan judul peneliti.

b. Menentukan obyek penelitian

Penentuan obyek penelitian dilakukan sesuai dengan judul peneliti yaitu pada lembaga birokrasi dinas sosial Kabupaten Probolinggo.

c. Mengurus surat perizinan

Sebelum dilakukan penelitian, peneliti harus memenuhi syarat-syarat administrasi yang menjadi SOP dari lembaga yaitu membawa surat izin penelitian resmi dari perguruan tinggi.

d. Memantau, mengecek dan menilai keadaan lapangan

Dalm hal ini peneliti melakukan analisis lapangan sebagai bentuk pengamatan terhadap keadaan lapangan.

e. Memilih informan

Informan adalah sumber memperoleh data, dengan demikian peneliti dalam menentukan informan menggunakan metode purposive sumpling supaya tepat sasaran.

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Seorang peneliti dalam melakukan proses penelitian perlu menyiapkan beberapa hal pada saat dilapangan salah satu diantaranya ialah pedoman wawancara. Hal ini harus tersusun dengan rapi agar informan dapat memahami setiap pertanyaan.

g. Mempersiapkan persoalan etika penelitian

Etika merupakan sikap penting yang harus dimiliki oleh peneliti pada saat melakukan penelitian. Etika yang baik akan mendapatkan penyambutan yang baik pula oleh informan, dan informan dengan senang hati memberi beberapa sumber data yang dibutuhkan oleh peneliti.

## 2. Tahap Pelaksanaan

### a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri

Peneliti melakukan pengamatan terhadap tempat penelitian hal ini bertujuan supaya peneliti dapat memahami latar penelitian. Disamping itu peneliti juga mempersiapkan diri untuk memulai proses penelitian.

### b. Memasuki atau turun ke lapangan penelitian

Pada saat turun lapangan peneliti melakukan beberapa hal yaitu mempersiapkan perlengkapan penelitian seperti pedoman wawancara, alat rekam dan tidak lupa etika.

### c. Mengakrabkan hubungan dengan informan.

Sebuah hubungan yang baik antara peneliti dan informan perlu dibangun pada saat melakukan wawancara. seperti yang dilkaukan oleh peneliti dengan cara mengakrabkan diri dengan informan. Karena hal tersebut sangat berdampak baik dalam proses penelitian untuk mendapatkan data yang diinginkan. Hubungan komunikasi yang baik akan menghasilkan frekuensi positif antar sesama.

### d. Menggali dan mengumpulkan data.

Proses menggali dan mengunpulkan data peneliti melakukan beberapa hal dalam memperolehnya yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari ketiga hal tersebut peneliti dapat mengumpulkan data sehingga dapat dideskripsikan dan disajikan dalam tulisannya.

### e. Mengevaluasi data

Evaluasi data merupakan proses akhir dari tahapan pelaksanaan penelitian. Peneliti melakukan evaluasi terhadap data yang didapat dari beberapa informan karena data yang diperoleh perlu diidentifikasi supaya sesuai dengan pokok permasalahan.

## 1) Tahap Penyelesaian

### a Menganalisis data

Menganalisis data adalah proses pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap data yang diperoleh. Dalam proses menganalisis data peneliti melakukan beberapa langkah yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

### b Menyajikan data dalam bentuk laporan

Setelah melakukan serangkaian tahap-tahap pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan penyajian data dari hasil penelitian yang dilakukan. Hal ini peneliti dapat mendeskripsikan hasil data penelitian sesuai dengan pokok permasalahan.

### c Menyempurnakan laporan dengan merevisi data.

Revisi data merupakan akhir dari tahap penyelesaian penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hal tersebut merupakan bentuk penyempurnaan dalam sebuah laporan dari hasil penelitian.

**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Letak Geografis Lokasi Penelitian

Dinas Sosial merupakan tempat penanganan sosial yang bertempat di Jl. Ahmad Yani No.23, mangunharjo, Kec. Mayangan, kab. Probolinggo. Geografis Lokasi penelitian bahwa Kabupaten Probolinggo mempunyai semboyan '*Prasadja Ngesti Wibawa*'. Makna semboyan Prasadja berarti bersahaja, jujur dengan terus terang, *Ngesti* berarti menginginkan, menciptakan, mempunyai tujuan, sedangkan *Wibawa* berarti mukti, luhur, mulia. '*Prasadja Ngesti Wibawa*' berarti Dengan rasa tulus ikhlas menuju kemuliaan. Kabupaten Probolinggo mempunyai ciri fisik yang menggambarkan kondisi geografis, terdiri dari dataran rendah pada bagian utara, lereng-lereng gunung pada bagian tengah dan datarantinggi pada bagian selatan, dengan tingkat kesuburan dan pola penggunaan tanah yang berbeda. Untuk wilayah pegunungan terdiri dari Gunung Bromo serta Argopuro.

Sedangkan jumlah sungai yang ada di Kabupaten Probolinggo antara lain Sungai Pekalen, Banyubiru, Ronggojalu, Kedunggaleng dan Patalan. Sungai terpanjang adalah Rondoningo dengan panjang 95,2 Km. Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu bagian dari Propinsi Jawa Timur yang terletak diantara 112°51' - 113°30' BT dan 7°40' - 113°30'

LS dengan luas wilayah sekitar 169.616 Ha atau 1696,17 Km<sup>2</sup> ( 1,07% ) dari luas daratan dan lautan dari Propinsi Jawa Timur.<sup>46</sup> Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Kabupaten Probolinggo dikelilingi oleh Pegunungan Tengger, Gunung Semeru, dan Gunung Argopuro.<sup>47</sup> Adapun itu batas-batas wilayah sebagai berikut : Utara : Selat Madura, Selatan : Kabupaten Lumajang dan Malang, Barat : Kabupaten Pasuruan, Timur : Kabupaten Situbondo bondowoso dan Jember.

Secara umum wilayah Kabupaten Probolinggo terdiri atas 2 bagian yaitu Probolinggo daratan dan Pulau Gili dengan luas wilayah sebesar 1696,17 Km<sup>2</sup> yang terbagi atas 24 Kecamatan dengan wilayah yang paling luas berada pada Kecamatan Krucil ( 202,53 Km<sup>2</sup>). Adapun Jumlah desa / kelurahan yang ada di Kabupaten Probolinggo sebanyak 325 desa dan 5 Kelurahan. Kecamatan yang memiliki desa terbanyak ialah Kecamatan Paiton dengan 20 Desa.

Jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo berdasarkan perhitungan BPS sebanyak 1.092.036 yang terdiri dari 523.652 laki-laki dan 568.384 perempuan. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,01%. Adapun tingkat kepadatan penduduk rata-rata 644 Jiwa/Km<sup>2</sup> dengan tingkat kepadatan tertinggi terjadi di Kecamatan Sumberasih dan yang terendah di Kecamatan Sumber. Penduduk Kabupaten Probolinggo mayoritas adalah suku Jawa dan suku Madura. Suku madura di Kabupaten

---

<sup>46</sup> Dokumentasi, *Profil Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo*, 2020

<sup>47</sup> Dokumentasi, *Profil Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo*, 2020



Probolinggo lebih banyak presentase jumlahnya dibandingkan di Kabupaten Jember. Bahasa daerah Jawa dan Madura mudah dijumpai di setiap wilayah, sehingga sangat umum masyarakat Probolinggo menguasai kedua bahasa daerah ini dengan cukup baik. Hal serupa juga berlaku di daerah Jember yang terkenal sebagai pusat budaya Pendalungan. Selain itu, juga terdapat Suku Tengger yang dipercaya merupakan turunan langsung dari Kerajaan Majapahit. Wilayah Kabupaten Probolinggo adalah daerah pantai yang sangat asri seperti Kecamatan Tongas, Sumberasih, Dringu, Pajarakan, Kraksaan, Paiton yang terdapat Wisata Pantai Pasir Putih dan Panorama dan terumbu karang. Sedangkan daerah pegunungan berpotensi untuk pengembangan sektor perkebunan dengan berbagai komoditnya.

Penduduk Kabupaten Probolinggo mayoritas adalah suku Jawa dan suku Madura. Suku Madura di Kabupaten Probolinggo lebih banyak presentase jumlahnya dibandingkan di Kabupaten Jember. Bahasa daerah Jawa dan Madura mudah dijumpai di setiap wilayah, sehingga sangat umum masyarakat Probolinggo menguasai kedua bahasa daerah ini dengan cukup baik. Hal serupa juga berlaku di daerah Jember yang terkenal sebagai pusat budaya Pendalungan. Selain itu, juga terdapat Suku Tengger yang dipercaya merupakan turunan langsung dari Kerajaan Majapahit.

Wilayah Kabupaten Probolinggo adalah daerah pantai yang sangat asri seperti Kecamatan Tongas, Sumberasih, Dringu, Pajarakan, Kraksaan,

Paiton yang terdapat Wisata Pantai Pasir Putih dan Panorama dan terumbu karang. Sedangkan daerah pegunungan berpotensi untuk pengembangan sektor perkebunan dengan berbagai komoditnya. Adapun itu persentase mata pencaharian penduduk Kabupaten Probolinggo dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>48</sup>

**Tabel 4.1**  
**Presentase Mata Pencaharian Penduduk Kab Probolinggo**

No	Profesi/pekerjaan	Jumlah
1	Petani	46,20%
2	Nelayan	2,80%
3	Pedagang/pengusaha	6,50%
4	Pns/Abri	42,80%

## 2) Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo

Dinas sosial kabupaten probolinggo merupakan tempat penyandang masalah sosial yang menimpa kepada seseorang khususnya di kabupaten, tidak hanya itu juga bahwa dinas sosial mempunyai tugas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsinya dalam urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang sosial sebagai wadah penyandang masalah sosial untuk daerah kabupaten probolinggo.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Dokumentasi, *Profil Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, 2020*

<sup>49</sup> Dokumentasi, *Profil Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, 2020*

### 3) Tugas pokok dan fungsi

#### a. Tugas pokok

Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Nomer Peraturan Bupati No 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo sebagai berikut:

##### 1) Sekertaris

Pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana, penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah, pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran serta pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan.

##### 2) Bidang Pemberdayaan Sosial

Perencanaan kerja dibidang pemberdayaan sosial, pelaksanaan koordinasi terkait dengan pembinaan dibidang pemberdayaan sosial meliputi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga ( LK3 ) dan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil ( KAT), potensi sumber kesejahteraan sosial serta pelaksanaan proses perizinan usaha kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Serta

pelaksanaan pengaturan distribusi atas permintaan tanah pemakaman pada makam milik pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### 3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pelaksanaan koordinasi terkait dengan pembinaan dan pengembangan dibidang perlindungan dan jaminan sosial meliputi kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam, kerja sama dan pengelolaan logistik bencana, penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, serta Penguatan Program Keluarga Harapan, Program Rastra maupun validitas program penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, pedoman teknis, identifikasi, asesment serta penjangkauan cepat, konsultasi dan konseling serta intervensi psikososial, mengembangkan pelayanan bimbingan mental sosial dan ketrampilan serta bantuan sosial UEP, reasesment terkait pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi korban bencana sosial, pekerja migran bermasalah dan

pemulangan orang terlantar serta pelaksanaan dan pengendalian norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang perlindungan dan jaminan sosial.

#### 4) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Pada bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan, koordinasi kegiatan serta pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. pelaksanaan dan pengendalian norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial. fungsi di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik mental dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidak mampuan sosial, ekonomi, berdasarkan kesesuaian fungsi dilaksanakan oleh bidang rehabilitasi sosial.

#### 5) Sumber Daya Manusia Dinas Sosial

Jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo sebanyak 40 orang terbagi dalam beberapa komposisi: <sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Dokumentasi, *Profil Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo*, 2020

a. Berdasarkan tingkat pendidikan

**Tabel 4.2**  
**Komposisi Pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

<b>NO</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	S2	9
2	S1	18
3	SMA/Diploma	13
	Total	40

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo mendorong dan akan memfasilitasi pegawai untuk meneruskan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo mempunyai semangat untuk mempunyai pegawai yang berlatar belakang pendidikan sosial dengan kata lain relevan sesuai dengan bidang sosial. Pegawai Dinas Sosial diharapkan mengikuti dan mendapatkan pelatihan di bidang kesejahteraan sosial. Melalui cara ini diharapkan para pegawai Dinas Sosial yang memiliki latar belakang pendidikan beragam mendapatkan spirit atau semangat untuk mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial. Kemudian dari pada itu diharapkan adanya dukungan dari lembaga-lembaga formal untuk memfasilitasi para pegawai Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo untuk meneruskan jenjang

pendidikannya guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

b. Berdasarkan Jabatan

**Tabel 4.3**  
**Komposisi Pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo**  
**Berdasarkan Jabatan**

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	9
4	Staf	26
	Jumlah	40

4) Struktur dan Visi Misi Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo

**Tabel 4.4**  
**Stuktur dan Vsi Misi Organisasi Dinas Sosial Kabupaten**  
**Probolinggo**

No	Nama	Jabatan
1.	Ahcmad Arif, SH.MH	Kepala Dinas Sosial
2.	DRS. Achmad Fauzi Efendy, Msi	Sekertaris Dinas Sosial
3.	Dra. Rugistina	Kabid Pengembangan dan Pemberdayaan Sosial
4.	Drs. Soedjianto, Msi	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
5.	Dra Titik Indayanti MM	Kabid Perlindungan Rehabsos
6.	Dra Nurhayati, Msi	Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial
7.	Susi Damayanti, S.pd	Kasi Pemberdayaan Sosial, Pengembangan dan penyelenggaraan kesejahteraan Sosial
8.	Yuliati, S.Sos. MM	Kasi perlindungan Korban bencana Alam
9.	Rokhmad Junaedi, S.Sos.MM	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

10.	Abubakar, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian
11.	Bahari, S.Sos	Kasi Pelayanan Rehabsos, Anak dan Lanjut Usia
12.	Rachmad, S.Sos	Kasi Perlindungan Sosial Bencana Sosial
13.	Mukmina, Sp	Kasi Penanganan dan Pemberdayaan Fakmis
14.	Samsul Hadi, S.Sos	Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan Disabilitas
15.	Bekti Dinarwati, S.Sos	Kasi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
16.	Tauhid, S.Sos,MM	Kasi Perlindungan dan Rehabsos Penyandang Tuna Sosial

Struktur merupakan sebuah susunan yang dibuat untuk mengatur istilah, keturunan, atau tingkat formal. Diantara pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan struktur organisasi dinas sosial kabupaten Probolinggo, di antaranya:<sup>51</sup>

Adapun bidang yang berhubungan dengan penelitian ini:

a. Kepala dinas sosial

b. Sekretaris, membawahi :

1) Kasubag umum dan kepegawaian

2) Kasubag Perencanaan dan Keuangan:

c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, ataupun

kekersan seksual membawahi :

<sup>51</sup> Dokumentasi, *Profil Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo*, 2020



1) Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Kasie pelayanan dan rehabilitasi sosial mempunyai fungsi sebagai penghimpunan dan menelaah bahan pedoman pelayanan dan rehabilitasi sosial Disabilitas meliputi penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat ganda, penyandang cacat eks penderita penyakit kronis, pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan serta melaksanakan koordinasi pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas dalam rangka pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat ganda, penyandang cacat eks penderita penyakit kronis serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan yang dilaksanakan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas pada kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat ganda, penyandang cacat eks penderita penyakit kronis.

2) Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

Kasi pelayanan dan rehabilitasi sosial dan lanjut usia mempunyai fungsi diantara pelaksanaan

penghimpunan dan menelaah bahan pedoman pelayanan dan rehabilitasi sosial Anak dan Lanjut Usia meliputi pelayanan sosial anak balita, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, pengembangan kemampuan, bimbingan lanjut dan aksebelitas sosial lanjut usia serta melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan serta melaksanakan koordinasi pelayanan dan rehabilitasi sosial Anak dan Lanjut Usia dalam rangka pelayanan sosial anak balita, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, pengembangan kemampuan, bimbingan lanjut dan aksebelitas sosial lanjut usia.

### 3) Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang

#### Tuna Sosial

Kasi pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial mempunyai fungsi diantaranya melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan serta melaksanakan koordinasi pelayanan dan

rehabilitasi tuna sosial penyandang tuna sosial dalam rangka pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan yang dilaksanakan dibidang pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial penyandang tuna sosial pada kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila.

#### 5) Program Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo

Terdapat beberapa pembangunan kesejahteraan sosial yang dijabarkan dalam rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo diantaranya ialah :<sup>52</sup>

##### a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas melalui pengelolaan administrasi perkantoran melalui kegiatan:

- 1) Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran

---

<sup>52</sup> Dokumentasi, *Profil Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo*, 2020

- 2) Penyediaan jasa administrasi kepegawaian
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial melalui kegiatan:

- 1) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur
- 2) Pengadaan sarana dan prasarana aparatur
- c. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

- 1) Peningkatan Kapasitas SDM

- d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelaporan capaian kinerja OPD terkait dengan perencanaan dan keuangan, melalui kegiatan:

- 1) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- 2) Penyusunan rencana program dan kegiatan SKPD
- 3) Peningkatan pengelolaan barang milik daerah

- e. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan penyandang PMKS lainnya. Program ini mempunyai sasaran Fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, exit PKH dan kelompok usaha bersama (KUBE ), melalui kegiatan:

- 1) Pemberdayaan masyarakat fakir miskin
  - 2) Pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi
  - 3) Pemberdayaan exit PKH
  - 4) Penunjang pembangunan kesejahteraan sosial
- f. Program pemberdayaan penyandang disabilitas dan Program Pelayanan dan Rehabilitasi sosial. Program ini memberikan bantuan alat bantu kecacatan, bantuan alat usaha dan permukiman. Sasaran utama program ini ialah Balita,Lansia,disabilitas,dan Tuna Sosial.

**Tabel 4.5**  
**Data Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Probolinggo Per Juli 2019**

<b>kecamatan</b>	<b>Jumlah</b>
BANTARAN	236
BANYUANYAR	374
BESUK	397
DRINGU	377
GADING	409
GENDING	274
KOTAANYAR	264
KRAKSAAN	341
KREJENGAN	344
KRUCIL	319
KURIPAN	301
LECES	340
LUMBANG	308
MARON	502
PAITON	421
PAJARAKAN	199
PAKUNIRAN	280
SUKAPURA	94
SUMBER	121
SUMBERASIH	373
TEGALSIWALAN	240

TIRIS	361
TONGAS	441
WONOMERTO	323
(blank)	
<b>Grand Total</b>	<b>7639</b>

## B. Penyajian data dan Analisis

### 1. Proses peran dinas sosial dalam pemberdayaan disabilitas

Dalam hal ini peneliti telah mengetahui deskripsi tentang dinas sosial dan sumber daya yang ada serta lembaga yang membantu dinas sosial dalam melaksanakan pekerjaan. Adapun peneliti melakukan wawancara terhadap Bapak Arif selaku kepala dinas sosial kabupaten probolinggo, menyatakan bahwa:

“Dalam peraturan bupati yang sudah tertera di undang-undang bahwasannya Dinas Sosial adalah satu lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk membantu bupati yang mana secara pasti Dinas Sosial sendiri memiliki hubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat, dalam menangani pelayanan yang berfokuskan kepada kesejahteraan masyarakat. Baik masalah-masalah yang terdapat di dalam masyarakat ataupun kelompok-kelompok tertentu. Kalau sumber daya dinas sosial secara struktural sudah pas, yang mana terdiri dari bidang samapai kepada seksi-seksi, kalau secara tenaga insyallah kita masih butuh mas, karena lingkupanya kita kan kesejahteraan dan juga cangkupanya sangat luas. Mangkanya itu kita tidak bisa bekerja sendiri sehingga salah satunya, dinas sosial dibantu oleh lembaga-lembaga lain. Yaitu tskk dan peksos. Tskk itu sendiri yaitu tenaga kesejahteraan Sosial kecamatan yang mana tskk ini dibentuk oleh kementerian Sosial dalam hal utamanya yaitu membantu Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas, dalam bidang kesejahteraan baik sebagai penyelenggara/pelayanan masyarakat”<sup>53</sup>

<sup>53</sup> Arif, *Wawancara*, Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, 3 Juni 2021.

Dari wawancara tersebut dijelaskan bahwasanya dinas sosial adalah birokrasi penyelenggara dari program-program kepala daerah yaitu bupati. Sebagai pelaksana tugas pelayan masyarakat, utamanya dalam bidang sosial. Dalam Peraturan Bupati No 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, dari kepala dinas samapai terhadap kepala seksi memiliki tugas, pokok, dan fungsi yang sudah ditentukan. Sehingga peraturan yang dibuat bupati terhadap penyelenggara pelayan masyarakat memudahkan pegawai dalam melaksanakan kinerja-kinerja sesuai dengan tupoksinya. Selain itu dinas sosial dalam melaksanakan tugas juga dibantu oleh pegawai non asn seperti TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan Peksos (Pekerja Sosial).

Pernyataan tersebut juga mendapatkan tambahan tentang perencanaan program bagi seluruh pegawai dalam lingkup dinas sosial. mengatakan bahwa:

“Di dalam dinas sosial sendiri juga memiliki program-program khusus terhadap seluruh pegawai yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggaran kesejahteraan sosial. Bukan hanya sekedar pegawai yang terlibat tetapi pekerja sosial seperti TKSK, LKKS, KT, PSM LKS, dan LK3 kita libatkan. Karena pekrja sosial selain sebagai pelayan masyarakat, mereka juga sebagai pembantu penyelenggaraan penyusunan anggaran nantinya, karena kalau tidak adanya itu semua kita kesulitan untuk membuat anggaran.

Dinas sosial kabupaten probolinggo memiliki program-program yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Adapun

program dinas sosial yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial. Hal ini bukan hanya di terapkan bagi pegawai tetapi juga bagi tenaga-tenaga pekerja sosial dalam naungan dinas sosial kabupaten probolinggo. Pekerja sosial sendiri adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Seperti halnya yaitu:

- a. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
- b. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang selanjutnya disebut TKSM adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan,
- c. Karang Taruna adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.



- d. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut (LK3) adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.
- e. Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- f. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut (WKSBM) adalah Sistem kerjasama antar keperangkat pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.

Dari penjelasan yang dipaparkan oleh bapak arif, selaku kepala dinas sosial kabupaten probolinggo. Peneliti kembali melakukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih signifikan terhadap judul yaitu peran dinas sosial dalam pemberdayaan disabilitas di kabupaten probolinggo. Adapun penjelasan bapak arif selaku kepala dinas menjelaskan tentang program dinas sosial bagi penderita disabilitas, mengatakan bahwa:

“Untuk program Dinas Sosial bagi penyandang disabilitas yaitu membentuk karakter yang mandiri. Karena ketika melihat penyandang disabilitas hidupnya selalu bergantung kepada orang lain maka dari itu dinas sosial sebagai birokrasi yang bertugas memberikan pelayanan kesejahteraan Wajib hukumnya bukan hanya kepada masyarakat umum dalam artian orang-orang normal yang kurang mampu tetapi juga terhadap penyandang disabilitas. Baik berbentuk materi ataupun non materi”.

Selain itu kepala dinas menambahkan bahwa:

“Dalam membentuk karakter yang mandiri dinas sosial sebagai fasilitator memberikan fasilitas apa yang dibutuhkan oleh penderita penyandang disabilitas seperti pemberian bantuan kaki palsu yang diharapkan mampu membantu kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas melakukan aktifitas. selain itu dinas sosial memberikan pendidikan untuk mengasah potensi setiap individu, sehingga dengan bantuan ini dapat dilihat skill setiap penyandang disabilitas, karena setiap orang itu punya skill yang berbeda-beda. yang di dampingi dengan TKSK ataupun PSM”

Selain itu bapak arif menambahkan pihak-pihak yang berkerja sama dalam membentuk karakter mandiri bagi penderita disabilitas, beliau mengatakan bahwa:

“Dinas sosial dalam memberikan pelayanan terhadap disabilitas juga berkerja sama, baik dengan komunitas-komunitas, perusahaan, ataupun lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang sosial dengan tujuan bisa memberikan pelayanan yang maksimal bagi penderita disabilitas. Seperti halnya semisal kita berkerja sama dengan komunitas wirausaha yang mana nantinya kita bisa mengadakan pelatihan-pelatihan ataupun dengan lembaga-lembaga sosial seperti halnya yayasan yang bergerak di pendidikan kita bisa menitipkan penderita disabilitas khususnya yang tunagrahita dalam menuntut ilmu.”

Dari penjelasan diatas bahwa dinas sosial kabupaten probolinggo memiliki program khusus bagi penderita disabilitas yaitu membentuk karakter mandiri. Adapun karakter mandiri yang dibangun oleh dinas sosial yaitu memberikan fasilitas, pendidikan, dan memunculkan potensi/skill bagi disabilitas. Dengan tujuan agar para penyandang disabilitas tidak tergantung kepada orang lain. Selain itu dalam mengembangkan karakter mandiri tersebut dinas sosial juga berkerja sama dengan pihak-pihak swasta baik dengan komunitas-komunitas, yayasan pendidikan ataupun perusahaan-perusahaan yang terdapat di Kabupaten Probolinggo.

## **2. Proses pemberdayaan disabilitas**

Dalam memperoleh data terkait berkaitan proses pemberdayaan. Peneliti selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bu titik Selaku Kabid perlindungan rehabilitasi sosial. Beliau menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan yang diperuntukan bagi penderita disabilitas.

“Untuk kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh dinas sosial terhadap penderita disabilitas itu sebenarnya sama dengan yang lain maksud sama dari yang lain yaitu dinas sosial sebagai tugas pelayan kesejahteraan masyarakat yaitu melakukan pelayanan terutama bagi penyandang disabilitas, seperti halnya memberikan bantuan memberikan pelatihan dan pemberdayaan, dan memberikan fasilitas pendidikan. Hanya saja dalam memberikan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas dinas Sosial tidak memandang apakah dia secara ekonomi mampu ataupun tidak. Kita tidak memandang baik dalam memberikan bantuan ataupun melakukan pelatihan dan pemberdayaan sifatnya lebih umum. Meskipun jarang sekali ada keluarga secara ekonomi mampu meminta bantuan secara fisik

kecuali dalam hal semisal dinas mengadakan pelatihan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas biasanya disabilitas cacat tubuh meskipun dia mampu secara ekonomi mereka ikut berpartisipasi. Karena disabilitas ini kan ada komunitasnya terutama yang di kabupaten Probolinggo”.<sup>54</sup>

Selanjutnya bu titik kembali menjelaskan tentang pelaksanaan pelatihan-pelatihan yang pernah dilaksanakan oleh dinas sosial. Beliau memaparkan:

“Pelatihan bagi penyandang disabilitas setiap tahun itu ada 2 kali, baik yang pernah diadakan oleh dinas sendiri atau pihak swasta yang berkerja sama dengan dinas, ada beberapa pelatihan yang pernah dilaksanakan seperti jahit, pembuatan keset atau juga pelatihan pembuatan sabun cuci piring. Untuk pengikut sendiri ini terbatas, tidak semua para penderita disabilitas itu mengikuti khususnya bagai penderita yang difabelnya itu berat, seperti kayak cacat mental itu jelas gak bisa selain itu cacat tubuh mungkin itu juga gak bisa mengikuti, karena memang keterbatasan gerak. Tetapi meskipun begitu untuk memberikan pelayanan khususnya bantuan materi kita rata dan tidak memandang apakah disabilitas dengan kategori berat atau ringan. Seperti yang sering dilakukan oleh dinas yaitu pemberian modal untuk usaha. Biasanya untuk hal ini bukan diperuntukan penderitanya tetapi wakilnya seperti orang tua, atau kerabat terdekatnya. Dengan tujuan memudahkan kebutuhan perekonomian, pembinaan juga ada dari dinas, yaitu memberikan motivasi hidup bagi penderita. Kita mendatangkan mentor-mentor yang memang ahli dalam bidangnya, serta juga pendidikan dinas juga ikut memantau baik dari segi pembiayaan atau pengembangan karakter”.

Dari penjelasan yang disampaikan bu titik selaku kabid rehabilitas sosial dapat disimpulkan bahwa. Dalam menangani kesejahteraan sosial dinas sendiri memiliki tanggung jawab sebagai leading sektor pelayanan bagi masyarakat kurang mampu, ataupun bagi penderita disabilitas. Tugas dan wewenangnya pun tidak ada

<sup>54</sup> Titik, *Wawancara*, Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, 7 Juni 2021.

yang membedakan baik pelayanan bagi masyarakat kurang mampu ataupun terhadap penderita disabilitas itu sendiri, terkecuali yang membedakan dari segi pelayanan, khusus bagi penyandang disabilitas memiliki pelayanan khusus. Dalam artian khusus sendiri pelayanan bagi penderita disabilitas tidaklah memandang baik dari segi usia, jenis disabilitas yang di alami, ataupun keadaan ekonomi. Selain itu bentuk-bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh dinas sendiri bukan hanya berbentuk bantuan secara materi tetapi juga dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Pelatihan sendiri dilaksanakan oleh dinas ataupun lembaga swasta yang berkerja sama dengan dinas. Paling tidak 2 kali selama satu tahun. Adapun pelaksanaan pelatihan yang pernah dilakukan yaitu menjahit, membuat sabun cuci piring, ataupun membuat keset.

Selanjutnya peneliti kembali melakukan wawancara untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang aspek pembagian disabilitas menurut dinas sosial. Adapun penelitian melakukan wawancara kepada bapak H. Samsul Hadi selaku kasi disabilitas, beliau mengatakan bahwa:

“Disabilitas di dinas sosial itu dibagi menjadi dua ada disabilitas yang berat dalam artian yang berat ini tidak bisa ngapa-ngapain selain di kasur. Dan disabilitas yang ringan jadi arti dari ringan ini masih dapat beraktivitas. Untuk disabilitas yang berat dinas sosial memberikan bantuan berupa uang sebagai taraf untuk kelangsungan hidup. Tetapi bagi yang ringan ini diberikan bantuan berupa alat usaha. Alat usaha sendiri dipergunakan sebagai modal untuk keberlangsungan hidup”.

Selain itu bapak H. Samsul Hadi kembali menjelaskan tentang pemberdayaan yang dilakukan oleh dinas sendiri bagi penderita disabilitas:

“Bentuk pemberdayaan sendiri bagi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh dinas yaitu pemberdayaan secara ekonomi dengan berbagai bentuk dan cara. Walaupun tidak semua kebutuhan penyandang disabilitas dapat terpenuhi dan instansi tidak bisa memfasilitasi. Bentuk pemberdayaan bagi penyandang disabilitas salah satunya yaitu berupa bantuan seperti halnya alat bantu usaha. Walaupun di dalamnya ada aturan administrasi. Yaitu permohonan pengajuan bantuan yang harus diketahui oleh camat dan lurah. Selain itu pemberdayaan yang dilakukan oleh dinas melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk menunjang kreativitas diri. Terutama yang berkaitan erat dengan entherpreneur. Dari pelatihan ini, nantinya dinas memberikan bantuan modal baik berupa uang ataupun barang. sehingga nantinya para penyandang disabilitas tidak perlu khawatir untuk memulai kegiatan entherpreneur”.

Dari penjelasan yang diberikan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melaksanakan pemberdayaan dinas sosial lebih mengarah kepada pemberdayaan secara ekonomi. pemberdayaan ekonomi sendiri yang diharapkan adalah para penyandang disabilitas mampu mendatangkan penghasilan, yang juga di bantu oleh instansi pemerintahan baik berupa modal usaha ataupun pelatihan-pelatihan wirausaha. Sebagai penunjang dalam mengangkat ekonomi keluarga.

### **3. Faktor- faktor penghambat pemberdayaan disabilitas**

Selanjutnya peneliti kembali bertanya tentang faktor yang memperhambat dinas sosial dalam melaksanakan pemberdayaan disabilitas. Adapun penjelasan yang dipaparkan oleh bapak H. Samsul Hadi yaitu:

“Penanganan penyandang disabilitas masih terbatas. Keterbatasan sebagaimana terkait pada penanganan penyandang disabilitas yang tidak merata, sehingga masih terdapat penyandang yang belum tersentuh penyuluhan/sosialisasi mengenai adanya pelatihan keterampilan, adanya bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas adapun faktor yang memperlambat yaitu keadaan tempat lokasi/jarak, Banyaknya pemain (aktor) yang terlibat karena banyak pihak yang harus terlibat dalam mempengaruhi pelaksanaan program, Terdapatnya komitmen atau loyalitas ganda, kerumitan yang melekat pada program itu sendiri, dan jenjang pengambilan keputusan terlalu banyak”.<sup>55</sup>

Dari penjelasan dapat disimpulkan bahwasanya disabilitas memiliki 2 kategori bagi dinas sosial sendiri. Yang pertama disabilitas dengan kategori berat dan disabilitas dengan kategori ringan. Disabilitas berat yaitu disabilitas yang secara fisik dan mental tidak bisa melakukan apa-apa, sedangkan disabilitas ringan secara fisik masih bisa melaksanakan kegiatan. Hal ini juga mempengaruhi bentuk pemberdayaan yang akan dilakukan oleh dinas sosial sendiri. Terutamanya yang mengalami disabilitas berat, dinas sosial hanya memberikan santunan setiap bulannya sebagai tambahan untuk kelangsungan hidup. Tetapi beda halnya dengan disabilitas ringan yang masih bisa dilakukan pemberdayaan seperti halnya mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun kegiatan-kegiatan yang menunjang kreativitas diri. Meskipun demikian masih banyak hambatan-hambatan yang mempengaruhi pemberdayaan bagi disabilitas diantaranya jarak/lokasi wilayah Kabupaten Probolinggo yang luas sehingga menyulitkan sosialisasi bagi penyandang disabilitas,

---

<sup>55</sup> H. Samsul Hadi, *Wawancara*, Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, 7 Juni 2021.

Banyaknya pemain (aktor) yang terlibat, Terdapatnya komitmen atau loyalitas ganda, kerumitan yang melekat pada program itu sendiri, dan jenjang pengambilan keputusan terlalu banyak

Kemudian dari beberapa narasumber yang berada di dinas sosial, peneliti kembali menggali informan yang mana lebih tertuju kepada penyandang disabilitas langsung. Yang mana penyandang disabilitas yang tertuju mengalami disabilitas tunagrahita yaitu jenis disabilitas Cacat pikiran, lemah daya tangkap dan idiot. Peneliti dalam melakukan wawancara tidak bisa langsung terhadap anaknya, tetapi lebih terhadap orang tua penderita. Adapun pertanyaan yang disampaikan kepada orang tuanya yaitu ibu herlin lebih terhadap bentuk dinas sosial dalam melaksanakan perannya sebagai leading sektor pelayanan khususnya bagi penyandang disabilitas, beliau mengatakan:

“Untuk anak saya yang dibantu oleh dinas sendiri itu santunan setiap bulannya, dan juga biaya pendidikan di SLB. Untuk sekolah sendiri itu juga dibantu oleh dinas akhirnya bisa masuk ke sana”.

Selanjutnya, ibu herlin kembali menjelaskan keuntungan putranya bisa di perhatikan oleh dinas sosial, beliau mengatakan:

“alhamdulillah mas, anak saya bisa diperhatikan oleh dinas itu sudah senang banyak dibantu juga oleh dinas sosial. Ini kan ada komunitasnya jadi saya sebagai orang tua ada semangat sendiri gitu. Selain itu anak kan titipan namanya titipan ya harus amanah. Kalau keuntungan dari dinas terutama bagi orang tua itu kan kayak ada mentornya, jadi saya sebagai ibuk mengetahui kekurangan anak saya dimana, kelebihannya dimana selain itu



anak saya mendapatkan pendidikan yang juga diarahkan oleh dinas. Ini sudah sangat bersyukur bagi saya”.<sup>56</sup>

Dapat disimpulkan bahwa ibu herlin adalah salah satu dari orang tua yang putranya mengalami tunagrahita yaitu disabilitas dengan Cacat pikiran, lemah daya tangkap dan idiot. Ibu herlin sendiri dalam mengurus putranya dibantu oleh dinas sosial baik dari segi pendidikan ataupun biaya untuk hidup setiap bulannya. Selain itu juga pedulinya dinas membuat ibu herlin merasa senang serta memberikan wawasan baru terutama tentang disabilitas.

### **C. Pembahasan Temuan**

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Dinas Sosial kabupaten Probolinggo yang telah diuraikan di atas, selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terhadap hasil peneliti dalam bentuk deskriptif analisis. Sebagaimana melakukan penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkapkan dari lapangan. Adapun fokus penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya mengenai peran dinas sosial dalam pemberdayaan disabilitas di kabupaten probolinggo.

#### **1. Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Disabilitas Di Kabupaten Probolinggo.**

Penyandang disabilitas sering dianggap tidak mampu melakukan kegiatan dan hanya menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat, dikarenakan keterbatasan gerak mereka. Hal ini menimbulkan masalah mental dan sosial bagi penderitanya. Dinas sosial selaku pihak yang

---

<sup>56</sup> Ibu Herlin, *Wawancara*, Rumah Penderita Disabilitas, 25 Juni 2021

menaungi penyandang disabilitas memiliki program yang terkait dengan bimbingan dan dukungan agar penyandang disabilitas mampu menjalankan peran dan tugas seperti manusia lainya. Sehingga tidak terjatuh dalam keadaan kondisi lemah dan terpinggirkan. Adapun program yang dibuat bagi penyandang disabilitas yaitu membentuk karakter mandiri. Dengan tujuan agar para penyandang disabilitas mampu memberikan manfaat bagi orang lain terutama keluarga sendiri. Dalam memperaktekan kemandirian dinas sosial sebagai fasilitator memberikan fasilitas apa saja yang dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas dengan memberikan arahan-arahan atau informasi-informasi yang dilakukan oleh pekerja sosial masyarakat (PSM) atau tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) berupa bantuan ataupun peluang-peluang pekerjaan. Selain itu pendidikan juga diberikan sebagai wadah dalam mengasah potensi/skill yang dimiliki. karena dari pendidikan, pengetahuan akan terus berkembang sehingga inovasi dan kreatifitas akan muncul.

- a. Dinas Sosial selaku instansi yang menaungi masalah sosial yg khususnya penyandang disabilitas sangat membantu penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya pemberian fasilitas apa yang dibutuhkan.
- b. Perhatian dari Dinas Sosial yang cukup besar bagi penyandang disabilitas dengan diterimanya penyandang disabilitas di sekolah-

- sekolah yang khusus untuk mereka dan hampir disamakan dengan siswa lainnya. Kecuali penyandang disabilitas dalam masalah mental
- c. Lapangan pekerjaan semakin lebar bagi penyandang disabilitas bagi yang memiliki keahlian/*skill*.

## **2. Bentuk Pemberdayaan Dinas Sosial terhadap Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Probolinggo.**

Bentuk pemberdayaan dinas sosial untuk mensejahterakan kaum yang lemah khususnya penyandang disabilitas sedikit banyak telah dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah. Terutamanya dinas sosial sendiri dalam melakukan pemberdayaan lebih berfokus kepada pemberdayaan dari segi ekonomi. Baik itu melalui peminjaman modal, pembinaan, ataupun pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk upaya untuk memperdayakan penyandang disabilitas agar dapat mencapai kehidupan yang lebih baik. Terkait dengan pembinaan terhadap penyandang disabilitas, pemerintah bertugas memberikan motivasi dengan harapan para penyandang disabilitas memiliki semangat untuk terus bergerak dan bisa memiliki tekad kuat untuk sukses. Sebagai penunjang semua itu dinas sosial juga memberikan peminjaman modal dan pelatihan-pelatihan kewirausahaan. bentuk-bentuk pelatihan kewirausahaan dari dinas sosial sendiri masih terbatas seperti pembuatan keset, jahit, ataupun pembuatan sabun cuci piring. Tentu saja kegiatan pemberdayaan dilakukan demi terwujudnya taraf hidup yang lebih baik.

Upaya kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo selaku instansi yang memang menaungi masalah penyandang disabilitas berupa pembinaan, kegiatan pelatihan entrepreneur, dan pemberian modal untuk usaha. Karena memang strategi dinas sosial dalam mewujudkan karakter mandiri lebih berfokuskan terhadap ekonomi.

### **3. Faktor Penghambat Dinas Sosial Dalam Memberdayakan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Probolinggo.**

Yang termasuk factor penghambat yaitu:

a. Banyaknya pemain (aktor) yang terlibat

Makin banyak pihak yang harus terlibat dalam mempengaruhi pelaksanaan program, karena komunikasi akan semakin rumit dalam pengambilan keputusan karena rumitnya komunikasi maka makin besar kemungkinan terjadinya hambatan dalam proses pelaksanaan.

b. Terdapatnya komitmen atau loyalitas ganda

Dalam banyak kasus, pihak yang terlibat dalam menentukan suatu program, telah menyetujui suatu program tetapi dalam pelaksanaannya masih mengalami penundaan karena adanya komitmen terhadap program lainnya,

c. Kerumitan yang melekat pada program itu sendiri

Sering sebuah program mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya karena sifat hakiki dari program itu sendiri.

Hambatan yang melekat dapat berupa factor teknis, factor ekonomi, factor perilaku pelaksana maupun masyarakat.

d. Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak

Makin banyak jenjang dan tempat pengambilan keputusan yang persetujuannya diperlukan sebelum rencana program dilakukan berarti makin banyak dibutuhkan untuk persiapan pelaksana program.

e. Jarak yang luas

Jarak yang luas daerah Kabupaten Probolinggo, juga menjadi salah satu faktor penghambat. Sehingga masih banyak kemungkinan para penyandang disabilitas masih belum tersentuh oleh pemerintah.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan dengan judul “Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Disabilitas di Kabupaten Probolinggo.” Berdasarkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran dinas sosial terhadap pemberdayaan disabilitas yaitu:
  - a. fasilitator, dengan memberikan fasilitas-fasilitas apa saja yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas baik berupa bantuan ataupun peluang-peluang pekerjaan. Peran fasilitator sendiri yang melaksanakan adalah pekerja sosial masyarakat (PSM) dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang memang ditugaskan oleh dinas sosial dalam menangani kesejahteraan masyarakat salah satunya disabilitas.
  - b. Pendidikan, sebagai modal dalam mengembangkan pengetahuan yang diharapkan mampu memunculkan keahlian/*skill* yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Dari situ penyandang disabilitas mampu menilai dirinya sendiri *skill* apa yang dimiliki sehingga bisa dijadikan pedoman dalam membangun ekonomi.
2. Bentuk pemberdayaan Dinas Sosial bagi penyandang disabilitas lebih terhadap pemberdayaan ekonomi. Baik itu melalui peminjaman modal, pembinaan, ataupun pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Hal tersebut

merupakan salah satu bentuk upaya untuk memperdayakan penyandang disabilitas agar dapat mencapai kehidupan yang lebih baik. Sesuai dengan program dinas sosial yaitu membentuk karakter mandiri.

3. Beberapa faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan Disabilitas di kabupaten Probolinggo yaitu banyaknya pemain (aktor) yang terlibat, terdapatnya komitmen atau loyalitas ganda, Kerumitan yang melekat pada program itu sendiri, Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak, dan jarak antar wilayah desa kabupaten probolinggo yang luas.

#### **B. Saran**

1. Kepada dinas sosial agar kedepannya lebih memperhatikan program-program yang di jalankan juga mendapatkan dampingan secara maksimal agar mempermudah penyandang disabilitas menikmati program pemerintah.
2. Standar oprasional prosedur (SOP) berkaitan dengan bantuan atau pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh dinas sosial juga harus jelas. diperuntukan kepada siapa, penderita disabilitas dengan jenis apa, dan hasil yang diberikan memiliki *feedback* apa.
3. Bagi peneliti selanjutnya, agar menjadi tambahan wawasan dan sebagai refrensi penelitian selanjutnya.

## DARTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2002. *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta : LP FEUI.
- Arikunto, Suharmi 2002. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka cipta.
- Ar-Rifa'I, Muhammad Nasib. 2007. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2, Cetakan ke-2*. Jakarta:Gema Insani.Ar-ruzz.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif*. bandung: CV. Pustaka Setia
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Sosial RI. 2006. *Panduan Kriteria Penyandang Cacat Fisik*. Jakarta: Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Direktorat Sosial RI.
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santoso. 2003. *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*. Jakarta: Walhi.
- Jim Iffe dan Frank Tesoriero. 2008. *Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jurnal Perempuan, *Mencari Ruang Untuk Difabel*, (Jakarta Selatan: Yayasan JYP Jurnal Perempuan).
- Kemenag RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta).
- Lamuji. 2019. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh Batik Tulis Shihaali Di Kampung Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Sekripsi: Universitas Islam Negeri Intan Lampung.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodelogi Penelitian*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mundir. 2013. *metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Jember: STAIN Press.



- Muslim, Aziz. 2009. *Metodologi Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta, penerbit TERAS.
- Muslim, Aziz. 2012. *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Prastowo, Andi. 2016. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Yogyakarta:
- Randy R. Wrihatolono Dan Riant Nugroho Dwijowojoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: PT. Elex Media Kopentindo.
- Reskiawati, Fitria. 2017. Pola Pembinaan Penyandang Disabilitas Tubuh Pada Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makasar. Skripsi: Universitas Islam Negeri Makasar.
- Sabtimarlia. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Desa Wisata*. Dikutip Dalam Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Santoso, Hargio. 2012. cara mendidik dan memahami anak berkebutuhan khusus. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Sholihatun, Wuri. 2015. Peran Badan Sosial Mardiwuto Dalam Pemberdayaan Difabel Netra Di Yogyakarta. Sekripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Soeharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soekanto, Soejono. 1997. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi. Mix Methods*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode penelitian Kualitatif Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta cv, 2018
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Gava Media.
- Tim Indepth Rights PPRBM Malang. 2016. *Hak-Hak Penyandang Disabilitas*. Malang: CBM.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuhrotul Kholidah Isnaini  
Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 21 Maret 1998  
NIM : D20162006  
Status : Mahasiswa  
Semester : X (Sepuluh)  
Fakultas/ Jurusan : Dakwah / Pengembangan Masyarakat  
Islam  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji  
Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Probolinggo, 07 September 2021  
Yang Menyatakan



Zuhrotul Kholidah Isnaini  
NIM. D20162006



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**DINAS SOSIAL**

Jl. Ahmad Yani No. 23 Telp./Fax (0335) 433840  
PROBOLINGGO 67211

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 460/ 161 /426 103/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ACHMAD ARIF,SH.MM  
NIP. : 19630502 199103 1 006  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Jember:

Nama : Zuhrotul Kholidah Isnaini  
Tempat tanggal lahir : Lamongan, 21 Maret 1998  
NIP/NIM : D20162006  
Status : Mahasiswa  
Semester : X (Sepuluh)  
Fakultas/Jurusan : Dakwah

Yang tersebut diatas adalah Mahasiswa IAIN Jember Fakultas Dakwah, Surat keterangan ini dibuat sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo dengan Judul "**Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Disabilitas di Kabupaten Probolinggo**"

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, Agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 24 Nopember 2020





**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Ahmad Yani No. 23 Telp./Fax (0335) 421440-434455

**PROBOLINGGO**

**SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY/RESEARCH**

Nomor : 072/14 /426.204/2021

Dengan ini menyatakan TIDAK KEBERATAN dilakukan survey/research oleh:

Nama Peneliti : Zuhrotul Kholidah Isnaini  
 Tempat tanggal lahir : Lamongan, 21 Maret 1998  
 NIP/ NIM : D20162006  
 Status : Mahasiswa  
 Semester : X (Sepuluh)  
 Fakultas/Jurusan : Dakwah  
 Tema/Acara Survey : **Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Disabilitas Di Kabupaten Probolinggo.**

Daerah/Tempat di

Lakukan survey/research : Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada pejabat setempat.
2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga, tata tertib, Keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan/lukisan yang dapat melukai/ menyinggung perasaan maupun / menghina agama, bangsa dan negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan survey/research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey /research sebelum meninggalkan daerah survey/research.
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan survey / research diwajibkan memberikan laporannya secara tertulis tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada Bupati Probolinggo Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.
7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Probolinggo, 24 Nopember 2020

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Probolinggo

**UGAS IRWANTO, S.Sos, MSi**

Pembina Utama Muda

NIP. 196

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN**

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Kamis, 27 Mei 2021	Obsevasi awal
2	Selasa, 01 juni 2021	Penyerahan surat izin peneliti
3	Kamis, 03 Juni 2021	Wawancara dengan bapak arif selaku kepala dinas sosial
4	Senin, 07 Juni 2021	Wawancara dengan bu titik selaku Kabid Perlindungan Rehabsos
5	Senin, 07 Juni 2021	Wawancara dengan bapak samsul hadi selaku Kasi Pelayanan d Rehabilitasi Sosial dan Disabilitas
6	Jum'at, 25 Juni 2021	Wawancara dengan ibu herlin selaku orang tua penyandang disabilitas

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PEDOMAN WAWANCARA

### **A. Kepala Dinas Sosial**

1. Apa tugas dinas sosial?
2. Apakah ada program yang direncanakan kepala dinas dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya yang ada?
3. Bagaimana peran dinas sosial dalam pemberdayaan disabilitas di kabupaten probolinggo?
4. Apa ada pihak-pihak tertentu yang berkerja sama dengan dinas sosial dalam menangani kesejahteraan di masyarakat
5. Apa hubungan dinas sosial dengan tskk dan peksos?

### **B. Kabid Perlindungan Rehabsos**

1. Apa kebijakan-kebijakan yang diperuntukan bagi penderita disabilitas?
2. Bagaimana pelaksanaan pelatihan-pelatihan yang pernah dilaksanakan oleh dinas sosial?

### **C. Kasi Pelayanan d Rehabilitasi Sosial dan Disabilitas**

1. Apa faktor yang memperlambat dinas sosial dalam melaksanakan pemberdayaan disabilitas?
2. Bagaimana pembagian disabilitas menurut dinas sosial.?

### **D. Ibu Herlin Orang Tua Penyandang Disabilitas**

1. Apa keuntungan putranya bisa di perhatikan oleh dinas sosial?
2. Bagaimana bentuk dinas sosial dalam melaksanakan perannya sebagai leading sektor pelayanan khususnya bagi penyandang disabilitas?

**DOKUMENTASI**

Wawancara bersama Bapak Achmad Arif selaku Kepala Disnas Sosial Kabupaten Probolinggo



Wawancara bersama kepala bidang Perlindungan Rehabsos





Wawancara bersama kasi Pelayanan d Rehabilitasi Sosial dan Disabilitas



Wawancara bersama salah satu orang tua penyandang Disabilitas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Pemberian bantuan kaki palsu kepada penyandang disabilitas



Pemberian bantuan kursi roda kepada penyandang disabilitas

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Pemberian bantuan berupa hewan ternak



Pemberian bantuan berupa alat selep

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**BIOGRAFI PENULIS**

Nama : Zuhrotul Kholidah Isnaini  
NIM : D20162006  
Fakultas/Prodi : Dakwah/ Pengembangan Masyarakat Islam  
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 21 Maret 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Sunan Giri No. 53 Sumber Taman Wonoasih Kota  
Probolinggo  
No. Telp : 082143411788  
Email : isnaini2198@gmail.com  
Riwayat Pendidikan :  
1. SDN 1 Deket Kulon  
2. SMPN 2 Paciran  
3. MAN 1 Lamongan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER